

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI



Oleh:

MUQNIATUL HUSNIYAH

NIM : 220502110060

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR
DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh:
MUQNIATUL HUSNIYAH
NIM : 220502110060

**JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

SKRIPSI

Oleh
Muqniatul Husniyah
NIM : 220502110060

Telah Disetujui Pada Tanggal 22 Juni 2026
Dosen Pembimbing,



Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A
NIP. 198505282019031005

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA
PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP
KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN
PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
SKRIPSI**

Oleh
MUQNIATUL HUSNIYAH
NIM : 220502110060

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 25 Juni 2026

Susunan Dewan Penguji:

Tanda Tangan

1 Ketua Penguji

Isnan Murdiansyah, M.S.A

NIP. 198607212019031008



2 Anggota Penguji

Dr. Yona Octiani Lestari, SE., M.SA., CSRS.,

CSRA., CFrA

NIP. 197710252009012006



3 Sekretaris Penguji

Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

NIP. 198505282019031005



Disahkan Oleh:
Ketua Program Studi,



Dr. Kholilah, M.S.A
NIP.198707192019032010

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muqniatul Husniyah

NIM : 220502110060

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat untuk memenuhi kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Fiskal Di Provinsi Jawa Timur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi"**

Adalah hasil karya sendiri, bukan "duplikasi" dari pihak lain. Selanjutnya apabila dikemudian hari ada "klaim" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau Pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Malang, 21 Juni 2026

Hormat Saya,

A handwritten signature in black ink is written over a red revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'KEANX205485575'.

Muqniatul Husniyah
NIM. 220502110060

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini adalah bukti, “Kita Punya Kendala, Allah Punya Kendali”. Makadari itu, penulis persembahkan karya ini spesial untuk sosok-sosok luar biasa yang tanpa lelah mendukung penulis darisegala sisi, yang selalu mampu menjadikan “pulang” bukan hanya sebuah kata, tetapi berisi kenyamanan, yang selalu siap “memeluk” ketika rintihan dan keresahan itu mulai datang.

Teruntuk orang tua tersayang, Ayah Muslimin dan Ibu Musrifah.

Terimakasih atas segalanya.

terima kasih atas kesabaran yang luar biasa dalam membersamai penulis, yang selalu menjadi penopang atas rapuhnya penulis, yang dengan segala perjuangannya hingga penulis sampai dititik ini.

Untuk adik tersayang, Muhammad Kafa Bina Hasibiin. Seseorang yang dalam diamnya selalu mensupport penulis, mendengarkan cerita-cerita penulis, Terimakasih, semoga kita selalu diridhai Allah untuk sukses dan bahagia dunia akhirat. Aamiin.

Akhir kata, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk siapa pun yang ikut hadir dan andil dalam perjalanan ini. Walau hanya sejenak, walau hanya dalam diam, atau bahkan walau hanya dalam benak. Terima kasih banyak, penulis yakin kebaikan-kebaikan saat ini salah satunya tercipta dari doa kalian semua.

02/07/'26

MOTTO

“Innamal a'malu binniyat”

Sesungguhnya segala sesuatu bergantung pada niatnya.

-Shahih Bukhori

“La tahzan, innallaha ma'ana.”

Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.

-QS. At-Taubah ayat 40

“Disini tidak ada penyesalan, yang ada hanya cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Disamping mengerti haknya sebagai hamba dan haknya terhadap sesama.”- Peta, Tulungagung.

“Live life to the fullest”

Hiduplah dengan sepenuh hati.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Indeks Kemandirian Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi” dengan baik.

Skripsi ini meru[akan serangkaian perjalanan panjang penuh lika-liku yang tidak mungkin dilalui tanpa bantuan, doa, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan penuh rasa hormat dan terima kasih menyampaikan penghargaan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., C.H.R.M., C.R.P.M., selaku Rektor.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.Ei., selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
3. Ibu Kholilah, MSA., selaku Ketua Proram Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahannya yang memudahkan penulis dalam menapaki perjalanan ilmiah.
4. Bapak Lutfi Ardhani, S.E., MSA., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Sri Andriani, S.E., M.Si selaku dosen wali yang selalu menyemangati, mendukung, memberikan pelajaran, serta banyak memberikan dorongan dan peluang yang sangat berharga bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi, atas dedikasi dalam mengajar serta inspirasi yang tertanam dalam setiap pembelajaran.
7. Ayah tercinta Muslimin dan Ibu tersayang Musrifah, tak lupa adik tercinta Muhammad Kafa Bina Hasibiin, yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang. Terima kasih atas doa, cinta, dan dukungan yang tidak pernah terputus sepanjang perjalanan ini. Tanpa doa dan semangat dari kalian mungkin penulis belum tentu bisa sampai dititik ini.
8. Teruntuk “seseorang” yang dimasa depan Allah takdirkan membersamai penulis, yang sampai saat ini masih Allah rahasiakan ia, Terimakasih telah

menjadi alasan tidak langsung untuk terus semangat menyelesaikan karya ini, semoga kita segera dipertemukan di waktu yang tepat.

9. Seluruh guru penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu, khususnya Ustadzah Firo, Bu Yatim, Umik, dll yang telah memberikan ilmu, doa, dan semangat yang tak ternilai.
10. Teman-teman seperjuangan dari satu mahad hingga satu kos, yaitu Kos Ungu, khususnya Putri, Belinda, Dinda, dan Fina, yang selalu kebersamaan penulis dalam perjalanan kehidupan kampus yang penuh warna, terimakasih banyak atas uluran tangan kalian yang ikhlas tanpa pamrih selalu membantu penulis, selalu mendengarkan cerita penulis, semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik.
11. Teman-teman seperjuangan Akuntansi angkatan 2022, khususnya Tsabita, Laela, Sandra, Wahyu dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Utamanya Ela, Terimakasih sudah membantu penulis dalam menghadapi semester-semester akhir ini, sudah membantu penulis saat menguji data, dan masih banyak lagi, semoga kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik dan bahagia.
12. Sahabat-sahabat sejak SMP “Fani Puji” yaitu Faza, Jidda, dan Puput, yang selalu memberikan semangat yang tak pernah padam.
13. Keluarga besar Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, khususnya pengurus LSO Kopma PB tahun buku 2024, khususnya Andin, Meilin, Mbak Farah, Rico, Shihab, dkk terima kasih atas kebersamaan, kerja keras, dan pengalaman yang sangat berharga.
14. Keluarga Besar Asisten Laboratorium “Mini Bank”, khususnya Pak Dana, Nisa Akt, Carissa, Devi, Kifah, dkk, terimakasih banyak sudah menjadi salah satu rumah yang teduh dan penuh pengalaman dan pembelajaran yang berharga didalamnya.
15. Teman-teman kamar 29 Mahad ABA 2022, Aisy, Dila, Tria, Amel, Ismi, Yola, Rahma, Karisna, Bela, dan Uni Luvi terima kasih atas kebersamaan dan kenangan indah selama satu tahun yang penuh makna itu.

16. Keluarga KKM 95 Pradaya Bhakti, khususnya Muti, Mbak Ima, Mbak Nanda dan kawan-kawan, terima kasih atas pengalaman dan kebersamaan yang berkesan.
17. Teman-teman dan adik-adik PKL di Bank Jatim Capem Pandaan, khususnya Putri, Nabila, Arin, Bintang, Cinta, Indah, dan lainnya, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman berharga dalam mengenal dunia kerja. Tak lupa pula mbak-mbak BJ, yaitu Mbak Tri, Mbak April, Mbak Nita, Pak Putut, Pak Nanang, Mbak Rachel, dkk, terimakasih banyak atas ilmu dan bimbingannya untuk penulis dalam kegiatan pkL yang tak terlupakan itu.
18. Teman-teman seperjuangan bimbingan, khususnya Dini dan Hulwah, yang telah saling menguatkan dalam proses yang penuh tantangan ini.
19. Terakhir, untuk diri sendiri yang telah berani bertahan, bangkit, dan terus melangkah di tengah berbagai rintangan. Terima kasih telah tetap percaya pada ikhtiar, doa, serta rahmat Allah SWT yang senantiasa menyertai setiap langkah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Malang, 13 April 2026



Muqniatul Husniyah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
المخلص.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2. Kajian Teoritis.....	22
2.2.1 Second-Generation Fiscal Federalism (SGFF)	22
2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	24
2.2.3 Dana Perimbangan	24
2.2.4 Belanja Modal	25
2.2.5 Kemandirian fiskal	26
2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi.....	26
2.2.7 Teori dalam Perspektif Islam	28
2.3. Kerangka Berpikir	29
2.4 Hipotesis	30
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal	30
2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal.....	31
2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal Daerah	32
2.4.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh PAD terhadap Kemandirian Fiskal	33

2.4.5 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal	33
2.4.6 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal	34
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	37
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Populasi dan Sampel	38
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	39
3.5 Data dan Jenis Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	40
3.7 Definisi Operasional Variabel	41
3.8 Teknik Analisis Data	46
3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif	46
3.8.2 Analisis Pemilihan Model	46
3.8.3 Analisis Regresi Data Panel	48
3.8.4 Uji Asumsi Klasik	49
3.8.5 Uji Hipotesis	50
3.8.6 Moderated Regression Analysis (MRA)	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil Penelitian	52
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	53
4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif	55
4.1.3 Pemilihan Model Terbaik	56
4.1.4 Uji Hausman	57
4.1.5 Uji Asumsi Klasik	58
4.1.6 Regresi Data Panel	60
4.1.7 Uji Hipotesis	61
4.1.8 Uji Moderasi (Moderated Regression Analysis)	64
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal	65
4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal	66
4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Kemandiran Fiskal	67
4.2.4 Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pengaruh PAD terhadap IKF	67
4.2.5 Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap IKF	68
4.2.6 Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pengaruh Belanja	

Modal terhadap IKF	68
BAB V KESIMPULAN	69
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Rasio Kemandirian Jawa Timur	2
Gambar 2.1 Grafik Realisasi PAD Jawa Timur	3
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2.2 Tabel Perbedaan	11
Tabel 3.1 Tabel Kriteria IKF	39
Tabel 3.2 Kategori Kemandirian Fiskal	43
Tabel 3.3 Tabel Definisi Operasional Variabel	44
Tabel 4.1 Data Objek Penelitian	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	55
Tabel 4.4 Uji Hausman	56
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	57
Tabel 4.6 Uji Multikolinieritas	58
Tabel 4.7 Uji Parsial	60
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi	62
Tabel 4.9 Uji MRA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Lampiran 2. Hasil Statistik Deskriptif

Lampiran 3. Hasil Uji Chow

Lampiran 4. Hasil Uji Hausman

Lampiran 5. Hasil Uji LM

Lampiran 6. Hasil Uji T

Lampiran 7. Hasil Uji R²

Lampiran 8. Hasil Uji MRA

Lampiran 9. Bukti Konsultasi

Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Muqniatul Husniyah, 2026, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi”

Pembimbing : Lutfi Ardhani, S.E, M.SA

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Indeks Kemandirian Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang menggabungkan data cross-section dari 36 kabupaten/kota dan data time series selama periode 2020–2024. Berdasarkan hasil pengujian pemilihan model, Random Effect Model (REM) merupakan model yang paling tepat digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, yang berarti semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan sendiri, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskalnya. Sebaliknya, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat menurunkan kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Fiskal, yang menunjukkan bahwa pengeluaran investasi pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal dan juga tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal. Di sisi lain, Pertumbuhan Ekonomi terbukti mampu memperkuat pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal.

Temuan ini mendukung *Second Generation Theory of Fiscal Federalism* (SGFF) yang menekankan pentingnya kapasitas fiskal daerah, optimalisasi sumber pendapatan lokal, serta pengelolaan belanja yang produktif dalam mendorong kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

ABSTRACT

Muqniatul Husniyah, 2026, THESIS. Title: “The Effect of Local Revenue, Capital Expenditures, and Equalization Funds on the Fiscal Autonomy Index in East Java Province, with Economic Growth as a Moderating Variable”

Supervisor : Lutfi Ardhani, S.E, M.SA

Keywords : Local Revenue, Capital Expenditures, Equalization Funds, Fiscal Autonomy Index, Economic Growth.

This study aims to analyze the influence of Local Own-Source Revenue (PAD), Equalization Funds, and Capital Expenditures on Fiscal Autonomy, with Economic Growth as a moderating variable. This study employs panel data regression analysis, combining cross-sectional data from 36 regencies/cities and time-series data for the period 2020–2024. Based on the results of the model selection test, the Random Effects Model (REM) is the most appropriate model to use.

The results indicate that PAD has a positive and significant effect on fiscal autonomy, meaning that the higher a region's ability to generate its own revenue, the higher its level of fiscal autonomy. Conversely, Equalization Funds have a negative and significant effect, indicating that dependence on transfer funds from the central government can reduce a region's fiscal autonomy. Meanwhile, Capital Expenditures do not have a significant effect on Fiscal Autonomy, suggesting that government investment spending has not yet fully succeeded in enhancing regional fiscal capacity. The moderation test results show that Economic Growth is unable to strengthen the influence of Local Revenue on Fiscal Autonomy Independence, and is unable to moderate the influence of Transfer Funds on Fiscal Autonomy Independence. On the other hand, Economic Growth has also been proven to strengthen the influence of Capital Expenditures on Fiscal Autonomy.

These findings support the Second Generation Theory of Fiscal Federalism, which emphasizes the importance of fiscal incentives and local capacity in achieving sustainable fiscal autonomy.

المخلص

مقتنية الحسنية، 2026، رسالة جامعية) لدرجة البكالوريوس. (العنوان "أثر الإيرادات المولدة محلياً والنفقات الرأسمالية، وأموال الموازنة على مؤشر الاستقلال المالي في مقاطعة جاوة الشرقية، مع اعتبار النمو الاقتصادي متغيراً معديلاً".

المشرف: لطفي أرداني

الكلمات المفتاحية: الإيرادات المولدة محلياً، النفقات الرأسمالية، أموال الموازنة، مؤشر الاستقلال المالي، النمو الاقتصادي.

، وصناديق الموازنة، والنفقات (PAD) تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير الإيرادات المولدة محلياً (moderating variable) الرأسمالية على الاستقلال المالي، مع اعتبار النمو الاقتصادي متغيراً معديلاً. حيث تجمع بين بيانات مقطعية (panel data) وتستخدم الدراسة تحليل الانحدار للبيانات المجمعة. 2020 إلى 2024 مدينة وبيانات سلاسل زمنية تغطي الفترة من 36-منطقة (cross-sectional data). هو النموذج الأنسب (REM) "نموذج التأثيرات العشوائية" وقد أظهرت اختبارات اختيار النموذج أن للاستخدام.

وتشير النتائج إلى أن الإيرادات المولدة محلياً لها تأثير إيجابي ومعنوي على الاستقلال المالي؛ وهذا يعني وفي المقابل، تبين أنه كلما زادت قدرة المنطقة على توليد إيراداتها الخاصة، ارتفع مستوى استقلالها المالي أن لصناديق الموازنة تأثيراً سلبياً ومعنوياً، مما يشير إلى أن الاعتماد على الأموال المحولة من الحكومة ومن ناحية أخرى، لا يوجد تأثير معنوي للنفقات الرأسمالية. المركزية قد يقلل من الاستقلال المالي الإقليمي على الاستقلال المالي، مما يوحي بأن الإنفاق الاستثماري الحكومي لم ينجح بعد بشكل كامل في تعزيز أن النمو الاقتصادي لا يعزز تأثير (moderation test) وتُظهر نتائج اختبار التعديل. القدرة المالية الإقليمية الإيرادات المولدة محلياً على الاستقلال المالي، كما أنه لا يعدل تأثير صناديق الموازنة على الاستقلال. ومع ذلك، فقد تبين أن النمو الاقتصادي يعزز تأثير النفقات الرأسمالية على الاستقلال المالي. المالي

، التي تؤكد على أهمية القدرة (SGFF) "الجيل الثاني من نظرية الفيدرالية المالية" وتدعم هذه النتائج المالية الإقليمية، والاستغلال الأمثل لمصادر الإيرادات المحلية، وإدارة الإنفاق المنتج في تعزيز الاستقلال المالي المستدام.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah di Indonesia dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik dengan mengoptimalkan potensi fiskal yang dimiliki. Pengoptimalan potensi fiskal dapat diindikasikan melalui tingkat kemandirian fiskal tiap daerah. Hal tersebut tercantum dalam kerangka otonomi daerah yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa indikator penting yang mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat sekaligus meningkatkan kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan adalah dengan mengukur tingkat kemandirian fiskal daerah (Mardiasmo, 2021). Kebijakan desentralisasi fiskal secara normatif juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah agar kemandirian daerah dapat tercapai sebagaimana tujuan utama otonomi daerah (Setianda et al., 2025).

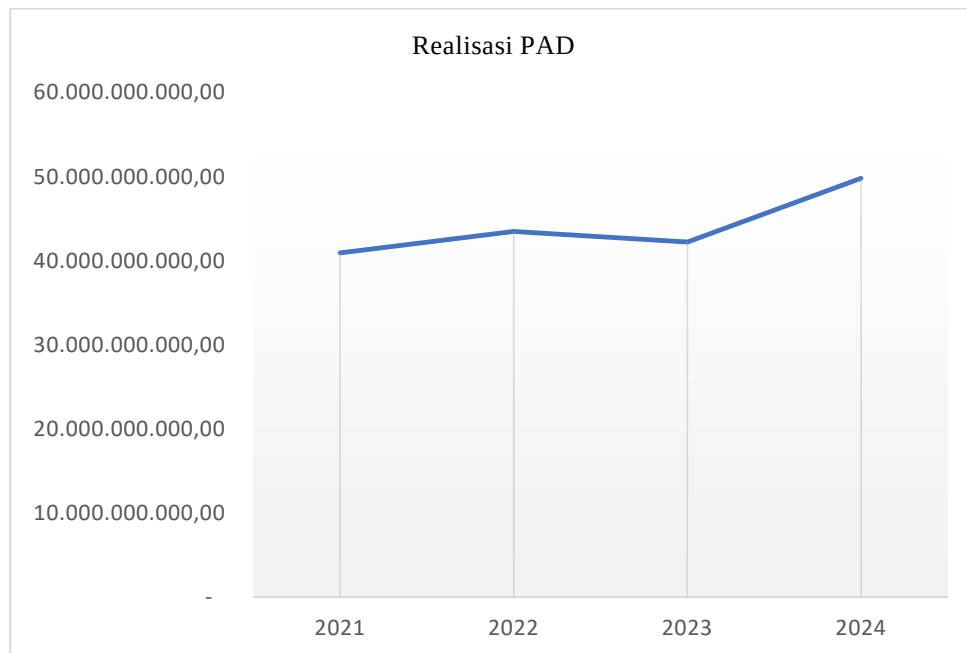
Namun sampai saat ini, yang terjadi di Indonesia menunjukkan fenomena kemandirian fiskal daerah yang masih dalam kondisi relatif rendah. Berbagai daerah, termasuk provinsi-provinsi dengan kapasitas ekonomi besar, masih menghadapi ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat, meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa daerah secara nominal terus mengalami peningkatan (Peraturan Pemerintah Pusat, 2022). Studi terkini menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari potensi lokal memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi regional, tetapi peningkatan tersebut tidak serta-merta mampu menghilangkan ketergantungan fiskal maupun menjamin tercapainya kemandirian fiskal yang kuat (Rustiny, 2024). Kondisi ini menandakan adanya persoalan struktural dalam pengelolaan fiskal daerah yang belum sepenuhnya teratasi.

Gambar 1. 1 Grafik Rasio Kemandirian Provinsi Jawa Timur



Sumber: Diolah peneliti, 2025

Fenomena tersebut juga tercermin pada Provinsi Jawa Timur. Secara visual, grafik kemandirian keuangan Jawa Timur periode 2021–2024 menunjukkan adanya tren peningkatan dari sekitar 31% pada tahun 2021 menjadi sekitar 35% pada tahun 2024. Tren ini memberikan sinyal positif bahwa kemandirian keuangan Jawa Timur bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, apabila dicermati lebih lanjut, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa tingkat kemandiriannya berada pada kategori konsultif/rendah (Sefira & Budiwitjaksono, 2022). Artinya, peningkatan yang terjadi belum cukup kuat dan stabil untuk mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya secara mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa kekuatan ekonomi Jawa Timur yang relatif besar belum sepenuhnya terkonversi menjadi kapasitas fiskal daerah yang mandiri.

Gambar 1.2 Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur

Sumber: Diolah peneliti, 2025

Di sisi lain, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Timur dalam empat tahun terakhir juga menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, sebagaimana tergambar pada grafik realisasi PAD. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah peningkatan PAD tersebut telah selaras dengan peningkatan kemandirian daerah? Dengan kata lain, apakah kenaikan PAD benar-benar mampu mendorong daerah-daerah di Jawa Timur menjadi lebih mandiri secara fiskal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau justru masih diiringi dengan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer pusat (Dalisawintri, S. E. et al., 2025).

Gambaran di tingkat kabupaten/kota mempertegas kompleksitas permasalahan tersebut. Di Kota Malang, misalnya, PAD tumbuh rata-rata sebesar 8,1 persen per tahun, tetapi ketergantungan terhadap transfer pusat masih sangat tinggi, yakni sekitar 62 persen dari total pendapatan daerah pada tahun 2024 yang dapat dikatakan masih jauh dari kategori mandiri ideal (Wahyudi et al., 2024). Fakta ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD secara nominal belum cukup untuk mendorong kemandirian fiskal yang kuat dan berkelanjutan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Pada variabel Belanja Modal, misalnya, penelitian oleh Nurjanah et al. (2024) menemukan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal karena mampu meningkatkan aktivitas ekonomi dan potensi pendapatan daerah. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Malau & Simarmata (2020) yang menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. Sementara itu, penelitian Andriana (2020); Hairah et al. (2025); Syafira Frijunita et al. (2024) justru menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal masih belum dapat dijelaskan secara konklusif.

Inkonsistensi juga ditemukan pada peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi. Penelitian Hairah et al. (2025) membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal. Sebaliknya, penelitian Nurjanah et al. (2024) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada konteks daerah dan periode yang berbeda.

Selain itu, penelitian mengenai Dana Perimbangan juga menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian penelitian menemukan bahwa Dana Perimbangan atau komponen transfer pusat berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal karena meningkatkan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa efektivitas Dana Perimbangan dalam mendorong kemandirian fiskal sangat dipengaruhi oleh karakteristik fiskal masing-masing daerah.

Berdasarkan inkonsistensi temuan empiris dan keterbatasan pendekatan penelitian terdahulu, penelitian ini menghadirkan beberapa kebaruan yang secara

jelas membedakannya dari studi sebelumnya sekaligus mengisi celah penelitian yang ada. Pertama, dari sisi model empiris, penelitian ini mengintegrasikan tiga variabel fiskal utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam satu kerangka analisis yang utuh sebagai variabel independen. Pendekatan ini berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya oleh Hairah et al. (2025) dan Malau & Simarmata (2020) yang cenderung memisahkan komponen dana transfer seperti DAU, DAK, dan DBH secara parsial atau hanya memfokuskan analisis pada variabel fiskal tertentu, seperti belanja pegawai (Sefira & Budiwitjaksono, 2022).

Kedua, dari sisi pengukuran variabel dependen, penelitian ini menggunakan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan pendekatan transfer-based sebagai proksi kemandirian fiskal. Pendekatan ini berbeda dengan mayoritas penelitian terdahulu yang masih menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah atau total transfer sebagai indikator utama (Hairah et al., 2025; Nurjanah et al., 2024; Syafira Frijunita et al., 2024). Penggunaan IKF memungkinkan penilaian kemandirian fiskal yang lebih komprehensif karena tidak hanya merefleksikan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah, tetapi juga tingkat ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Ketiga, dari sisi objek dan konteks wilayah, penelitian terdahulu umumnya menggunakan cakupan nasional atau wilayah tertentu di luar Provinsi Jawa Timur, seperti seluruh daerah di Indonesia bagian khusus, Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, maupun unit analisis pada tingkat kota tertentu (Hairah et al., 2025; Malau & Simarmata, 2020; Nurjanah et al., 2024). Penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan Provinsi Jawa Timur memiliki dikarenakan Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di Indonesia, namun pada saat yang sama menunjukkan variasi tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi antar daerah (Ike et al., 2021). Kondisi ini tercermin dari adanya kabupaten/kota dengan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi berdampingan dengan daerah yang masih sangat bergantung pada Dana Perimbangan. Heterogenitas tersebut menjadikan Jawa Timur sebagai konteks yang tepat untuk menguji secara

lebih mendalam bagaimana PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal memengaruhi kemandirian fiskal daerah, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Keempat, perbedaan penting utama penelitian ini terletak pada penggunaan variabel moderasi. Sebagian besar penelitian terdahulu tidak memasukkan variabel moderasi dalam model analisis. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi, pengujiannya masih terbatas pada hubungan PAD atau masing-masing komponen dana transfer secara terpisah terhadap kemandirian fiskal (Hairah et al., 2025; Nurjanah et al., 2024). Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada hubungan Dana Perimbangan secara agregat terhadap kemandirian fiskal. Pendekatan ini mengisi gap empiris terkait belum optimalnya kajian yang menjelaskan apakah kondisi ekonomi daerah mampu memperkuat atau justru memperlemah pengaruh ketergantungan transfer fiskal terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman empiris yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal Daerah di Provinsi Jawa Timur dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur?

5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur?
6. Apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh PAD terhadap Kemandirian Fiskal daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian fiskal Provinsi Jawa Timur.
3. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal Provinsi Jawa Timur.
4. Menguji peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal Provinsi Jawa Timur.
5. Menguji peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Dana Perimbangan dan kemandirian fiskal Provinsi Jawa Timur.
6. Menguji peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara Belanja Modal dan kemandirian fiskal Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam bidang keuangan daerah terkait kemandirian fiskal.
 - b. Memperkaya literatur mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kemandirian keuangan daerah dengan memasukkan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi yang hasil penelitiannya masih inkonsisten.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menyusun strategi peningkatan PAD, optimalisasi penggunaan Dana Perimbangan, serta alokasi belanja modal untuk meningkatkan kemandirian fiskal.
3. Manfaat Akademis
- a. Menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait keuangan daerah, otonomi fiskal, serta peran pertumbuhan ekonomi dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai kemandirian fiskal daerah telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dengan menggunakan variabel, objek, dan metode analisis yang beragam. Secara umum, penelitian terdahulu berfokus pada sejauh mana sumber pendapatan daerah, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan komponen Belanja Pemerintah mampu meningkatkan Kemandirian Fiskal sebagai indikator keberhasilan otonomi daerah. Berikut kumpulan rekapitulasi penelitian terdahulu penelitian ini terkumpul dalam tabel.

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Wilda Hairah, Tb. Azhar Maksum & Keulana Erwin (2025) <i>The Effect of PAD, DAU, DAK, and Capital Expenditure on Regional Financial Independence with Economic Growth as Moderating Variable (2018–2022)</i>	Independen: (X1) PAD (X2) DAU (X2) DAK (X4) Belanja Modal Dependen: (Y) Kemandirian Fiskal Moderasi: (Z) Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda & Residual Test	• PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. • DAU, DAK, dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal, menunjukkan tingginya ketergantungan daerah pada transfer pusat. • Pertumbuhan ekonomi mampu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
				memperkuat pengaruh PAD dan DAU terhadap kemandirian fiskal, namun tidak memoderasi pengaruh DAK dan belanja modal.
2	Lulu & Dewi (2025) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Independen: (X1) PAD (X2) Dana Perimbangan Dependen: (Y) Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Data Panel	• PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif. • Secara simultan, PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3	Riris Nurjanah, Arvian Triantoro & Raden Dian Hardiana (2024)	Independen: (X1) PAD (X2) Belanja Modal Dependen: (Y) Kemandirian Fiskal	Regresi Data Panel (Eviews)	• PAD dan belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi	Moderasi: (Z) Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi pada hubungan PAD maupun belanja modal terhadap kemandirian fiskal.
4	Syafira Frijunita, Gurendrawati & Utami Ningtyas (2024) Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal	Independen: (X1) PAD (X2) Tax Effort, (X3) Belanja Modal Dependen: (Y) Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linier Berganda	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. - Tax effort dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan optimalisasi pajak belum sepenuhnya meningkatkan kemandirian daerah.
5	Kumba Digidowiseiso et al. (2023) Analisis Kemandirian Fiskal,	Variabel Deskriptif: Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal,	Analisis Deskriptif Kuantitatif	Tingkat kemandirian fiskal masih rendah ($\leq 0,28$) sehingga daerah

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara Periode 2017–2022	Efektivitas Fiskal		belum mandiri secara fiskal. Ketergantungan fiskal tergolong sangat tinggi (74,60%), namun efektivitas fiskal tergolong sangat baik (101,23%). Hasil ini menunjukkan peran pemerintah pusat masih dominan.
6	Kiki Zakiah (2022) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan PAD terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Independen: (X1) PAD (X2) Efektivitas APBD (X3) Efisiensi APBD Dependen: (Y) Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Regresi Data Panel	- Efisiensi APBD dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IKFD. - Efektivitas APBD tidak berpengaruh signifikan, menunjukkan efisiensi lebih menentukan kemandirian fiskal dibanding efektivitas anggaran.
7	Dimas Ariyo Dewantoro (2022)	Independen: (X1) Pajak Daerah	Regresi Data Panel (Eviews)	Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	(X2) Retribusi Daerah Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah		positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap kemandirian keuangan daerah, hal tsb menunjukkan pentingnya optimalisasi PAD.
8	Novianti & Ishak (2022) Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung	Independen: (X1) PAD Dependen: (Y) Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linier Beranda	• Pajak Daerah dan Lain-lain PAD memberikan pengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung • Retribusi Daerah memberikan pengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
				• HPKD yang Dipisahkan tidak memberi pengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung • Secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang signifikan dengan arah positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
9	Sefira M.V.P & Budi Witjaksono (2022) Analisis PAD dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Fiskal	Independen: (X1) PAD (X2) Belanja Pegawai Dependen: (Y) Kemandirian Fiskal	Regresi Linier Berganda (SPSS)	• PAD berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal, • Belanja pegawai tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian
10	Kristina et al. (2021)	Independen: (X1) PAD	Regresi Linier Berganda	• PAD berpengaruh positif

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	(X2) Dana Perimbangan Dependen: (Y) Kemandirian Keuangan Daerah		signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Secara simultan, PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
11	Sugiyanto & Musfirati (2021) Pengaruh DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Independen: (X1) DAU (X2) DAK (X3) DBH (X4) Dana Keistimewaan Dependen: (Y) Kemandirian Keuangan Daerah	Regresi Linier Berganda	- DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan - DAK dan dana keistimewaan berpengaruh positif signifikan, - sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
12	Eve Ida Malau & Eka Pratiwi Septania Parapat (2020)	Independen: (X1) PAD (X2) Belanja Modal	Regresi Data Panel	PAD berpengaruh positif terhadap

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
	Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal	Dependen: (Y) Kemandirian Fiskal		kemandirian fiskal. • Belanja modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan
13	Nina Andriana (2020) Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah	Independen: (X1) DAU (X2) DAK (X3) DBH (X4) Belanja Modal Dependen: (Y) Kemandirian Daerah	Regresi Linier Berganda	• Secara parsial, variabel dana perimbangan dan belanja modal tidak signifikan terhadap kemandirian daerah • Namun secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah.
14	Choiroel Woestho et al. (2020) Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Independen: (X1) Kemandirian Keuangan Daerah (X2) Kemampuan Keuangan Daerah Dependen: (Y) Pertumbuhan Ekonomi	Regresi Linier Berganda	• Kemandirian dan kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. • Namun tingkat kemandirian dan kemampuan fiskal daerah

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode / Analisis Data	Hasil Penelitian
				masih tergolong rendah.
15	Lukitawati et al. (2020) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Independen: (X1) Pajak Daerah (X2) Retribusi Daerah Dependen : (Y) Kemandirian Daerah	Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah dan variabel Retribusi Daerah baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten XYZ.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, terdapat sejumlah perbedaan yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya memiliki kesamaan fokus yaitu menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal pemerintah daerah. Tetapi pastinya tetap banyak perbedaan antar penelitian, terangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Tabel Perbedaan

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan
1	Wilda Hairah, Tb. Azhar Maksum & Keulana Erwin (2025) <i>The Effect of PAD, DAU, DAK, and Capital Expenditure on Regional</i>	Penelitian Wilda menggunakan cakupan nasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada Provinsi Jawa Timur. Variabel independen pada penelitian Wilda dipisah (PAD, DAU, DAK), sementara penelitian ini menggunakan Dana Perimbangan secara

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan
	<i>Financial Independence with Economic Growth as Moderating Variable (2018–2022)</i>	agregat (DAU+DAK+DBH). Selain itu, pengukuran kemandirian fiskal berbeda, di mana penelitian ini menggunakan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) berbasis transfer, serta periode penelitian yang lebih terbaru (2020–2024).
2	Lulu & Dewi (2025) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Penelitian ini menambahkan Belanja Modal sebagai variabel independen serta menggunakan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi, yang tidak digunakan dalam penelitian Lulu & Dewi. Selain itu, penelitian ini menggunakan periode penelitian yang lebih spesifik dan terkini.
3	Riris Nurjanah, Arvian Triantoro & Raden Dian Hardiana (2024) Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi	Penelitian Riris tidak memasukkan Dana Perimbangan sebagai variabel independen dan menggunakan objek Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan objek Provinsi Jawa Timur serta struktur variabel yang lebih komprehensif dengan menambahkan Dana Perimbangan.
4	Syafira Frijunita, Gurendrawati & Utami Ningtyas (2024) Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Fiskal	Penelitian Syafira tidak memasukkan Dana Perimbangan dan tidak menggunakan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memfokuskan Dana Perimbangan sebagai variabel utama serta

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan
		menguji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
5	Kumba Digdowiseiso et al. (2023) Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal, dan Efektivitas Fiskal Provinsi Kalimantan Utara	Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal dengan regresi dan variabel moderasi, sedangkan penelitian Kumba et al. bersifat deskriptif tanpa pengujian hubungan kausal antarvariabel.
6	Kiki Zakiah (2022) Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan PAD terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah	Penelitian Kiki menambahkan kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal serta menambahkan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi.
7	Dimas Ariyo Dewantoro (2022) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penelitian Dewantoro berfokus pada komponen PAD secara spesifik, sedangkan penelitian ini menguji PAD secara agregat bersama Dana Perimbangan dan Belanja Modal serta menambahkan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi.
8	Novianti & Ishak (2022) Pengaruh PAD terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Kota Bandung	Penelitian Novianti & Ishak berfokus pada komponen PAD secara rinci dan bersifat spesifik wilayah, sedangkan penelitian ini menggunakan PAD secara agregat, menambahkan Dana Perimbangan dan Belanja Modal, serta menggunakan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi.

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan
9	Sefira M.V.P & Budi Witjaksono (2022) Analisis PAD dan Belanja Pegawai terhadap Kemandirian Fiskal	Penelitian Sefira menggunakan Belanja Pegawai sebagai variabel pengeluaran, sedangkan penelitian ini menggunakan Belanja Modal dan menambahkan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi.
10	Kristina et al. (2021) Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penelitian Kristina tidak memasukkan Belanja Modal dan tidak menggunakan variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan model yang lebih lengkap dengan penambahan Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
11	Sugiyanto & Musfirati (2021) Pengaruh DAU, DAK, DBH, dan Dana Keistimewaan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penelitian Sugiyanto & Musfirati memisahkan komponen dana transfer dan tidak memasukkan PAD maupun variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan Dana Perimbangan secara agregat serta menambahkan PAD dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
12	Eve Ida Malau & Eka Pratiwi Septania Parapat (2020) Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal	Penelitian ini menambahkan Dana Perimbangan dan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi yang tidak digunakan dalam penelitian Eve Ida Malau & Parapat, serta menggunakan wilayah penelitian yang berbeda.
13	Nina Andriana (2020)	Penelitian Nina tidak memasukkan PAD dan tidak menggunakan variabel moderasi. Penelitian ini mengintegrasikan PAD, Dana

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Perbedaan
	Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Daerah	Perimbangan, dan Belanja Modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
14	Choiroel Woestho et al. (2020) Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah serta Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian Choiroel et al. menempatkan kemandirian keuangan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menempatkan kemandirian fiskal sebagai variabel dependen dengan pendekatan kausal dan moderasi.
15	Lukitawati et al. (2020) Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Penelitian Lukitawati hanya berfokus pada komponen PAD, sedangkan penelitian ini menguji pengaruh PAD bersama Dana Perimbangan dan Belanja Modal serta menambahkan variabel moderasi pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kemandirian fiskal dan kemandirian keuangan daerah telah banyak dilakukan dengan fokus, variabel, dan pendekatan yang beragam. Sejumlah penelitian menekankan peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai determinan utama kemandirian fiskal dan menemukan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah (Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025; Malau & Simarmata, 2020; Nurjanah et al., 2024; Siregar et al., 2026). Temuan serupa juga diperoleh pada penelitian yang lebih spesifik menyoroti komponen PAD, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, yang terbukti mampu meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara signifikan (Dewantoro, 2022; Dian & Farouq, 2022; Lukitawati, 2020). Di sisi lain, penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait Dana Perimbangan dan komponen transfer

pusat. Beberapa penelitian menemukan bahwa dana perimbangan atau DAU memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah, yang mengindikasikan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025; Musfirati & Sugiyanto, 2021). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan dana perimbangan tetap berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun arah pengaruhnya berbeda-beda (Andriana, 2020; Kristina et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas dana transfer sangat bergantung pada pola pengelolaan dan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Selain PAD dan dana transfer, belanja daerah, khususnya belanja modal, juga menjadi variabel yang banyak diteliti. Beberapa penelitian menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian fiskal karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan basis pendapatan daerah (Nurjanah et al., 2024). Namun, hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa belanja modal justru berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal, yang mengindikasikan bahwa belanja pembangunan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Andriana, 2020; Hairah et al., 2025; Malau & Simarmata, 2020; Syafira Frijunita et al., 2024).

Dari sisi pengembangan model, sebagian penelitian mulai memasukkan variabel moderasi, khususnya pertumbuhan ekonomi, untuk melihat efek kondisional terhadap hubungan antara PAD, belanja modal, dan kemandirian fiskal. Hairah et al. (2025) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD dan DAU terhadap kemandirian fiskal, sementara Nurjanah et al. (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi. Perbedaan hasil ini mengindikasikan masih adanya ketidakkonsistenan temuan empiris terkait peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dalam penelitian kemandirian fiskal.

Lebih lanjut, sebagian besar penelitian terdahulu masih menggunakan rasio PAD terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator kemandirian fiskal (Kristina et al., 2021; Malau & Simarmata, 2020; Musfirati & Sugiyanto, 2021).

Sementara itu, penelitian Zakiah (2022) telah menggunakan Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKFD) yang mempertimbangkan aspek efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian deskriptif oleh Digdowiseiso et al. (2023) menunjukkan bahwa meskipun efektivitas fiskal daerah tergolong tinggi, tingkat kemandirian fiskal masih rendah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih sangat dominan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap dalam penelitian kemandirian fiskal daerah, khususnya terkait penggunaan Dana Perimbangan secara agregat, integrasi PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dalam satu model, serta pengujian peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi dengan pengukuran kemandirian fiskal yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian sebelumnya dan memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian fiskal daerah. fokuskan pada tabel perbedaan.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1 Second-Generation Fiscal Federalism (SGFF)

SGFF berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan normatif dalam *First Generation Theory of Fiscal Federalism* yang mengasumsikan pemerintah bertindak secara benevolen (itikad baik) untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Berbeda dengan pendekatan tersebut, SGFF berangkat dari kerangka ini, perilaku fiskal pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan pelayanan publik, tetapi juga oleh struktur pendapatan, desain transfer fiskal, serta ekspektasi terhadap intervensi pemerintah pusat (Oates, 2005; Weingast, 2009).

Salah satu konsep kunci dalam SGFF adalah *soft budget constraint*, yaitu kondisi ketika pemerintah daerah memiliki ekspektasi bahwa defisit atau kegagalan fiskal akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat menyebabkan pemerintah daerah memiliki insentif yang lemah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengendalikan belanja secara efisien. Akibatnya, peningkatan transfer fiskal tidak selalu diikuti oleh peningkatan kemandirian fiskal, bahkan

dapat memperkuat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat (Oates, 2005; Rodden et al., 2003).

Sebaliknya, SGFF menekankan pentingnya penerapan *hard budget constraint*, yaitu kondisi di mana pemerintah daerah bertanggung jawab penuh atas keputusan fiskalnya dan tidak dapat mengandalkan bantuan pemerintah pusat untuk menutup defisit anggaran. Penerapan *hard budget constraint* mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi PAD, pengelolaan belanja yang lebih produktif, serta penciptaan iklim ekonomi yang kondusif. Dalam konteks ini, kemandirian fiskal dipandang sebagai hasil dari struktur insentif fiskal yang mendorong daerah membiayai pengeluarannya dari sumber pendapatan sendiri, bukan dari ketergantungan terhadap transfer pusat (Oates, 2005).

Lebih lanjut, SGFF menjelaskan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi daerah. Daerah yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi akan memiliki basis pajak yang lebih luas dan potensi PAD yang lebih besar, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh Dana Perimbangan terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah, tergantung pada kemampuan daerah dalam mengonversi pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi pendapatan fiskal yang berkelanjutan (Oates, 2005; Rodden et al., 2003).

Dengan demikian, *Second Generation Theory of Fiscal Federalism* memberikan landasan teoritis yang kuat untuk menjelaskan mengapa ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Perimbangan berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah, serta mengapa peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

2.2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20 didefinisikan sebagai pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah. Definisi ini menegaskan bahwa PAD merupakan instrumen utama untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan secara mandiri melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal.

Secara teori, PAD memegang peran penting dalam kemandirian fiskal karena mencerminkan kapasitas dan usaha fiskal pemerintah daerah. Menurut (Martinez-Vazquez & McNab, 2003). PAD memainkan peran sentral dalam membangun fiskal autonomy, karena pendapatan lokal yang kuat meningkatkan insentif pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara efisien dan berorientasi jangka panjang. Oleh karena itu, peningkatan PAD tidak hanya terkait dengan besaran penerimaan, tetapi juga kualitas tata kelola fiskal daerah, termasuk optimalisasi pajak, efisiensi retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang produktif.

2.2.3 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan salah satu instrumen utama kebijakan fiskal nasional yang digunakan pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Hastuti, 2018). Yang kemudian diubah menjadi Dana Transfer ke Daerah dalam UU No. 1 Tahun 2022 terkait Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tersusun atas:

1. Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu komponen dari TKD yang dialokasikan berlandaskan persentase tertentu dari penghasilan pada APBN serta kinerja terkait, yang ditujukan untuk daerah penghasil sebagai upaya pengurangan ketimpangan fiskal pada Pemerintah dan Daerah. Selain itu, DBH juga diberikan kepada daerah non penghasil untuk mengatasi pengaruh buruk eksternal dan/atau mendorong pemerataan pada suatu kawasan.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu elemen pada TKD yang dialokasikan untuk mereduksi ketimpangan dalam kapasitas keuangan serta kualitas pelayanan publik antar wilayah.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu bagian pada Transfer Keuangan Daerah (TKD) yang disalurkan dalam pembiayaan program, kegiatan, maupun kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan menunjang operasional layanan publik, dengan penggunaannya yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.
4. Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan Undang-Undang mengenai otonomi khusus.
5. Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

mengenai keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.2.4 Belanja Modal

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta menambah nilai aset pemerintah daerah. Definisi tersebut menunjukkan bahwa belanja modal bersifat investasi karena pengeluaran yang dilakukan tidak hanya untuk membiayai kegiatan saat ini, tetapi juga menciptakan manfaat jangka panjang yang meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

Secara konseptual belanja modal tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran pemerintah, tetapi sebagai mekanisme penguatan kapasitas fiskal dan pembangunan ekonomi daerah. Ketika belanja modal dialokasikan secara efektif untuk kegiatan produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi lokal, maka belanja tersebut dapat meningkatkan pendapatan

daerah dan pada akhirnya mendorong kemandirian fiskal. Sebaliknya, belanja modal yang tidak terarah atau tidak berbasis kebutuhan publik berisiko menjadi sumber pemborosan fiskal yang melemahkan keuangan daerah (Kemendagri, 2020).

2.2.5 Kemandirian fiskal

Kemandirian fiskal menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui sumber penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi lokal, terutama Pendapatan Asli Daerah (BPK RI, 2019). Lalu, penelitian Boadway et al., (1994) juga menyatakan bahwa kemandirian fiskal juga mencerminkan tingkat fiscal effort, yaitu sejauh mana pemerintah daerah berupaya menggali sumber pendapatan sendiri melalui kebijakan pajak dan retribusi yang efektif serta pengelolaan aset daerah yang produktif. Daerah dengan fiscal effort yang tinggi cenderung memiliki struktur pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan, sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya pemerintahan daerah yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, secara konseptual kemandirian fiskal bukan hanya soal komposisi pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan kinerja tata kelola keuangan, insentif fiskal, serta kemampuan ekonomi daerah. Tingkat kemandirian fiskal yang tinggi diharapkan mampu menciptakan pemerintahan daerah yang lebih responsif, efisien, dan akuntabel, karena daerah dituntut untuk membiayai kebutuhannya melalui optimalisasi potensi lokal, bukan ketergantungan pada pendanaan pusat.

2.2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kapasitas produksi suatu daerah secara berkelanjutan yang tercermin dari kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil (BPS, 2016). Pertumbuhan ekonomi tidak hanya menunjukkan peningkatan output, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah. Dalam konteks fiskal daerah,

pertumbuhan ekonomi memiliki implikasi penting terhadap kemampuan keuangan dan tingkat kemandirian fiskal.

Berdasarkan *Wagner's Law (Government Expenditure Theory)* oleh peningkatan aktivitas ekonomi akan diikuti oleh meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan publik, sehingga mendorong kenaikan belanja pemerintah. Jika pertumbuhan ekonomi tinggi, belanja pemerintah, khususnya belanja modal berpotensi lebih produktif dalam memperkuat kapasitas ekonomi daerah dan pada akhirnya meningkatkan kemandirian fiskal. Namun, apabila belanja lebih dominan digunakan untuk belanja rutin yang tidak produktif, pertumbuhan ekonomi justru dapat melemahkan pengaruh belanja modal terhadap kemandirian fiskal (Permana & Wika, 2013).

Senada dengan itu, *Musgrave Theory* menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam perekonomian mencakup fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1989). Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kapasitas fiskal daerah turut meningkat sehingga pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menjalankan fungsi alokasi secara optimal melalui pembiayaan pembangunan fisik, layanan publik, dan investasi daerah berbasis PAD. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal karena semakin luas aktivitas ekonomi lokal akan semakin memperbesar sumber pendapatan daerah (Musgrave & Musgrave, 1989). Namun, apabila struktur penerimaan daerah masih bertumpu pada dana perimbangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti peningkatan PAD, sehingga peran moderasi pertumbuhan ekonomi dapat menjadi lemah terhadap Dana Perimbangan atau bahkan tidak signifikan.

Selanjutnya, *Tax Base Expansion Theory* menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperluas basis perpajakan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, aktivitas produksi, konsumsi, dan investasi (Musgrave & Musgrave, 1989). Ketika perekonomian daerah tumbuh, potensi penerimaan pajak daerah meningkat sehingga memperkuat PAD dan meningkatkan kemampuan fiskal daerah secara mandiri. Namun, apabila pertumbuhan ekonomi tidak diikuti optimalisasi pemungutan pajak daerah atau reformasi pajak lokal, pertumbuhan

ekonomi tidak memberikan efek moderasi yang berarti terhadap pendapatan daerah (Olt et al., 2005). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi hanya akan memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal apabila kapasitas pemungutan pajak daerah mampu menangkap peluang ekonomi yang muncul.

Dengan demikian, ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat ataupun melemahkan pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal. Efektivitas peran pertumbuhan ekonomi sebagai moderator sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah mengelola insentif fiskal, memperluas basis pajak, dan mengalokasikan belanja secara produktif untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan ekonomi daerah.

2.2.7 Teori dalam Perspektif Islam

Konsep kemandirian dalam Islam berlandaskan ajaran tanggung jawab dan usaha manusia dalam mengoptimalkan potensi yang telah Allah karuniakan. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Najm [53]: 39,

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩

“Dan bahwa manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.” (Qur’an 53:39)

Ayat ini menegaskan bahwa hasil dan keberhasilan bergantung pada besarnya ikhtiar manusia. Dalam Tafsir Al-Misbah memandang ayat ini sebagai dasar etos kerja dan kemandirian dalam Islam karena kemajuan tidak akan tercapai tanpa usaha nyata dan tata kelola yang bertanggung jawab (Shihab, 2005).

Jika dikaitkan dengan pemerintahan daerah, ayat ini memberikan landasan konseptual bahwa kemandirian fiskal tidak mungkin tercapai apabila suatu daerah hanya bergantung pada bantuan pemerintah pusat tanpa upaya optimal dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD). Prinsip “tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya” mencerminkan bahwa keberhasilan pembangunan dan layanan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah memaksimalkan potensi ekonominya melalui pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, dan inovasi penerimaan lainnya. Hal ini sejalan dengan temuan Kurniati &

Devi, (2022) yang menunjukkan bahwa optimalisasi pendapatan asli daerah merupakan indikator utama kemandirian finansial pemerintah daerah dalam perspektif ekonomi Islam.

Selain itu, Islam juga menekankan amanah dalam pengelolaan keuangan publik sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 58,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil.” (Qur'an 4:58)

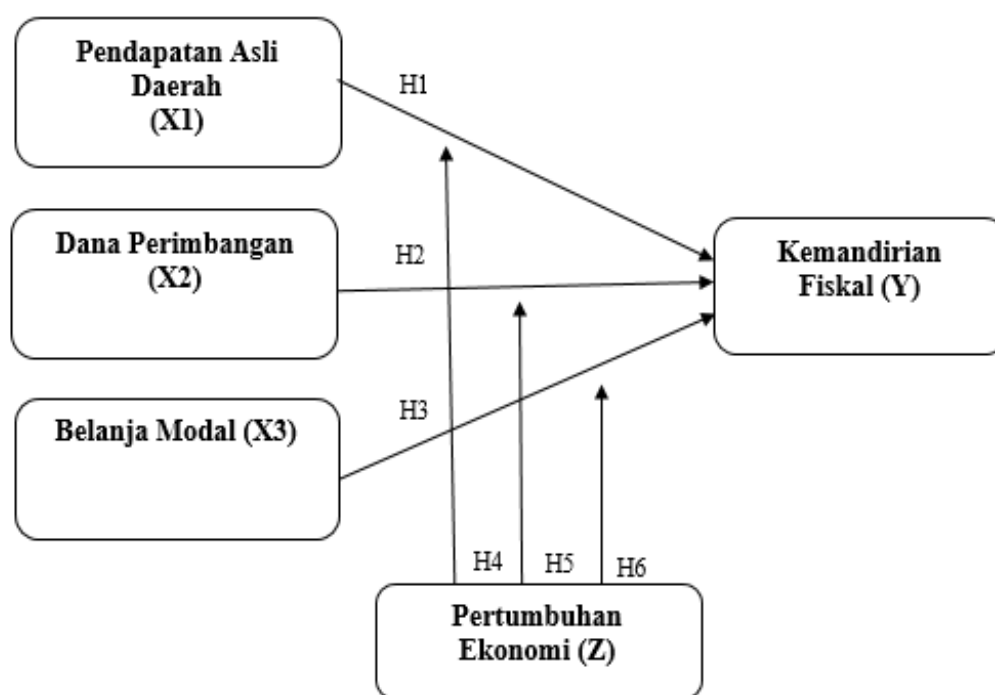
Dengan demikian, QS. An-Najm [53]: 39 dan QS. An-Nisa: 58 secara bersama-sama membentuk fondasi filosofis bagi kemandirian fiskal dalam perspektif Islam. Kemandirian fiskal bukan hanya ukuran kemampuan ekonomi daerah, tetapi juga indikator kualitas pelaksanaan amanah dan etos usaha dalam mengelola harta publik. Pemerintah daerah yang mampu membiayai pembangunan melalui pendapatan sendiri, menggunakan Dana Perimbangan secara proporsional, serta mengelola Belanja Modal secara produktif berarti telah mengamalkan nilai usaha (kasb) dan amanah yang diperintahkan Islam. Oleh karena itu, nilai-nilai Qurani tersebut sejalan dengan tujuan penelitian ini untuk mengkaji kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemandirian fiskal daerah.

2.3. Kerangka Berpikir

Kemandirian fiskal daerah dalam kerangka otonomi daerah sangat ditentukan oleh kemampuan daerah membiayai pembangunan secara mandiri, yang terutama tercermin melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), di mana berbagai penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal karena mampu menurunkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat (Kristina et al., 2021; Malau & Simarmata, 2020; Zakiah, 2022). Sebaliknya, Dana Perimbangan meskipun berfungsi untuk pemerataan fiskal, dalam banyak temuan empiris justru berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap

kemandirian fiskal akibat ketergantungan struktural daerah terhadap transfer pusat (Andriana, 2020; Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025). Belanja Modal secara teoritis berpotensi meningkatkan produktivitas dan kapasitas fiskal daerah, namun bukti empiris menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas perencanaan dan orientasi belanja (Malau & Simarmata, 2020; Nurjanah et al., 2024; Syafira Frijunita et al., 2024). Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diposisikan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal, sebagaimana ditunjukkan oleh Hairah et al., (2025) Berikut kerangka penelitiannya:

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi

ekonomi dan membiayai pembangunan secara mandiri. Berdasarkan *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), daerah dengan kapasitas pendapatan yang kuat memiliki insentif fiskal yang tinggi untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dan memperkuat kemandirian keuangannya. Hal ini sejalan dengan teori Desentralisasi Fiskal, yang menegaskan bahwa semakin besar kontribusi pendapatan daerah terhadap total penerimaan, semakin tinggi tingkat otonomi dan kemandirian fiskal suatu daerah (Oates, 2005; Weingast, 2009). Temuan penelitian terdahulu juga menunjukkan konsistensi arah hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal. Penelitian oleh Hairah et al. (2025) dan Zakiah (2022) menyimpulkan bahwa peningkatan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal karena bertambahnya PAD memperluas kapasitas pembiayaan dan mengurangi ketergantungan daerah pada dana transfer pusat. Dengan demikian, semakin besar PAD yang dapat dihasilkan daerah, semakin kuat tingkat kemandirian fiskalnya.

H1: PAD berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal.

2.4.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal

Dana Perimbangan merupakan transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai upaya pemerataan penyelenggaraan layanan publik di seluruh wilayah. Namun, menurut *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), keberadaan transfer fiskal yang besar berpotensi menimbulkan moral hazard, yaitu menurunnya motivasi pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatan sendiri karena ketergantungan pada dana pusat. Ketergantungan tersebut berdampak pada melemahnya insentif fiskal dan menghambat tercapainya kemandirian fiskal daerah (Weingast, 2009).

Kecenderungan ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. Penelitian oleh Weingast (2009) menunjukkan bahwa semakin besar Dana Perimbangan yang diterima, semakin tinggi tingkat ketergantungan fiskal daerah dan semakin rendah tingkat kemandiriannya. Hal ini terjadi karena daerah cenderung mengandalkan transfer pusat daripada mengoptimalkan PAD sebagai

sumber pembiayaan utama. Dengan demikian, peningkatan Dana Perimbangan tidak langsung memperkuat posisi fiskal daerah, melainkan dapat menurunkan kemandirian jika digunakan tidak secara proporsional dan produktif.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Fiskal.

2.4.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Belanja Modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk pengadaan aset yang memberi manfaat jangka panjang seperti infrastruktur, sarana pelayanan publik, dan fasilitas ekonomi. Dalam perspektif *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), daerah yang memiliki insentif fiskal yang kuat akan mengalokasikan belanja modal secara produktif untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dan pendapatan di masa mendatang (Weingast, 2009). Selain itu, Wagner's Law menjelaskan bahwa pertumbuhan kebutuhan publik akan mendorong pemerintah meningkatkan investasi pada sektor produktif, sedangkan Musgrave Theory menegaskan bahwa belanja pemerintah melalui fungsi alokasi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik dan mendorong perkembangan ekonomi daerah (Wagner, 1883).

Namun secara empiris, sebagian besar penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal. Penelitian oleh Hairah et al (2025), Malau & Simarmata (2020), Syafira Frijunita et al (2024) membuktikan bahwa pengalokasian Belanja Modal harus benar-benar sesuai dan harus diarahkan pada sektor produktif agar mampu meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, mendorong pertumbuhan PAD, dan pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal. Belanja Modal dialokasikan secara tidak efisien, mayoritas studi menyimpulkan bahwa kontribusi Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal bersifat negatif, dikarenakan belanja dipergunakan kadang masih belum tepat sasaran dan berorientasi kemanfaatan jangka panjang.

H3: Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kemandirian Fiskal.

2.4.4 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh PAD terhadap Kemandirian Fiskal

Pertumbuhan Ekonomi dipandang sebagai faktor yang memperkuat kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), daerah dengan ekonomi yang tumbuh memiliki insentif fiskal lebih besar untuk mandiri karena peningkatan aktivitas ekonomi memperluas peluang penerimaan dari PAD (Oates, 2005). Sejalan dengan Musgrave Theory, pertumbuhan ekonomi meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi fungsi alokasi melalui pembiayaan pembangunan berbasis PAD. Selain itu, *Tax Base Expansion Theory* menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi memperluas basis pajak sehingga memperbesar penerimaan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal (Musgrave & Musgrave, 1989).

Bukti empiris penelitian terdahulu juga mendukung peran pertumbuhan ekonomi sebagai moderator pada hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal. Studi oleh Hairah et al. (2025) dan Nurjanah et al., (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal karena pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan aktivitas usaha yang berdampak langsung pada peningkatan PAD. Penelitian Hairah et al. (2025) dan Malau & Simarmata (2020) juga menemukan bahwa PAD lebih efektif meningkatkan kemandirian fiskal pada daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi memperbesar kemampuan PAD dalam mendorong kemandirian fiskal, karena pendapatan daerah yang diperoleh dari aktivitas ekonomi lokal menjadi semakin luas dan stabil.

H4: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Fiskal.

2.4.5 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal

Menurut *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), transfer fiskal dari pusat melalui Dana Perimbangan dapat menimbulkan moral hazard apabila daerah bergantung pada transfer tanpa menggali potensi PAD secara optimal (Weingast, 2009). Ketergantungan tersebut akan melemahkan kemandirian fiskal. Namun, SGFF juga menegaskan bahwa insentif ekonomi daerah yang kuat, seperti

pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, mendorong pemerintah daerah untuk lebih produktif dan efisien dalam penggunaan Dana Perimbangan sehingga dapat mendukung peningkatan kemandirian fiskal (Hunter, 1977).

Dalam perspektif Wagner's Law, pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti dengan peningkatan belanja pemerintah. Apabila Dana Perimbangan digunakan secara produktif untuk kegiatan pembangunan pada saat ekonomi tumbuh, dampaknya terhadap kemandirian fiskal dapat menjadi lebih kuat (Wagner, 1883). Senada dengan Musgrave Theory, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kapasitas pemerintah daerah menjalankan fungsi alokasi dan distribusi menjadi lebih optimal sehingga Dana Perimbangan dapat benar-benar menjadi alat pemerataan pembangunan, bukan sumber ketergantungan (Musgrave & Musgrave, 1989).

Secara empiris, hasil penelitian terdahulu menunjukkan pola yang konsisten. Studi oleh Fadhila et al., (2025), Hairah et al., (2025), dan Musfirati & Sugiyanto (2021) menemukan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian fiskal pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, tetapi berpengaruh positif pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi karena aktivitas ekonomi yang kuat mendorong penggunaan Dana Perimbangan yang lebih produktif. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berpotensi mengubah arah dan kekuatan pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian fiskal: pada kondisi ekonomi tumbuh, Dana Perimbangan dapat menjadi stimulan kemandirian; tetapi pada kondisi stagnan, Dana Perimbangan justru cenderung memperlemah kemandirian akibat ketergantungan fiskal.

H5: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal.

2.4.6 Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal

Dalam perspektif *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), belanja modal merupakan instrumen pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pembangunan sarana publik yang mendorong aktivitas ekonomi jangka panjang (Weingast, 2009). Ketika belanja modal diarahkan secara produktif,

efeknya akan memperbesar kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sehingga berkontribusi pada peningkatan kemandirian fiskal. Namun, tingkat efektivitas belanja modal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pertumbuhan ekonomi (Wagner, 1883).

Berdasarkan Wagner's Law, meningkatnya pertumbuhan ekonomi mendorong peningkatan kebutuhan belanja pemerintah untuk memenuhi pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Ketika kondisi ini terjadi, belanja modal menjadi lebih produktif dan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas ekonomi daerah sehingga dampaknya terhadap peningkatan kemandirian fiskal menjadi lebih kuat (Wagner, 1883). Selain itu, Musgrave Theory menegaskan bahwa dalam kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik, pemerintah daerah lebih mampu menjalankan fungsi alokasi dan distribusi secara efektif sehingga outcome dari belanja modal semakin optimal (Musgrave & Musgrave, 1989).

Sejalan dengan *Tax Base Expansion Theory* (Musgrave & Musgrave, 1989), pertumbuhan ekonomi memperluas basis pajak melalui peningkatan pendapatan masyarakat, investasi, dan aktivitas produksi. Ketika belanja modal memicu pertumbuhan ekonomi, peningkatan tersebut akan kembali memperbesar penerimaan PAD yang kemudian meningkatkan kemandirian fiskal. Namun, pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah, belanja modal justru cenderung menjadi pemborosan fiskal karena tidak menghasilkan peningkatan penerimaan yang memadai, sehingga dampaknya terhadap kemandirian fiskal melemah. Temuan empiris mendukung pola tersebut. Penelitian Nurjanah et al. (2024) menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan, tetapi kekuatan pengaruhnya menjadi lebih besar pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Penelitian Hairah et al. (2025) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi hubungan belanja modal terhadap kemandirian fiskal, di mana moderasi bersifat memperkuat bila belanja modal dialokasikan secara produktif pada sektor ekonomi strategis.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel yang menentukan kuat atau lemahnya pengaruh belanja modal terhadap kemandirian

fiskal: pertumbuhan ekonomi tinggi memperkuat pengaruh belanja modal, sedangkan ekonomi stagnan melemahkannya.

H6: Pertumbuhan Ekonomi memperkuat pengaruh Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab–akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Jenis penelitian kausalitas digunakan karena penelitian ini berfokus untuk menguji apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal secara empiris berpengaruh terhadap kemandirian fiskal daerah sebagai variabel dependen, serta untuk mengetahui peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi (Hairah et al., 2025; Pertiwi et al., 2022). Penelitian dengan jenis kausalitas serupa juga telah banyak digunakan dalam studi keuangan daerah, khususnya yang mengkaji pengaruh variabel ekonomi dan fiskal terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah, dengan menggunakan analisis regresi data panel (Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025; Malau & Simarmata, 2020). Dengan demikian, pemilihan jenis penelitian kausalitas pada studi ini sejalan dengan pendekatan metodologis yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena penelitian bertumpu pada data numerik yang dianalisis secara statistik untuk menguji hubungan antar variabel. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), serta data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis data dilakukan menggunakan metode regresi data panel yang menggabungkan data lintas wilayah (cross-section) dan runtut waktu (time series), dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12. Pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel juga digunakan oleh beberapa peneliti sebelumnya dalam meneliti pengaruh variabel-variabel independen lain terhadap kemandirian fiskal daerah (Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025; Malau & Simarmata, 2020). Melalui pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan lebih objektif, sistematis, serta memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia serta memiliki keragaman karakteristik fiskal daerah (Ike et al., 2021). Provinsi ini juga konsisten menyajikan laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan yang dapat diakses publik, sehingga mendukung ketersediaan data yang diperlukan dalam penelitian. Keberagaman tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, belanja modal, serta kemandirian fiskal antar daerah menjadikan Jawa Timur sebagai lokasi yang relevan untuk menguji hubungan antar variabel penelitian.

Selain itu, Jawa Timur dipilih struktur ekonominya yang beragam, mulai dari pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hingga jasa, mencerminkan kompleksitas fiskal yang representatif. Perbedaan tingkat kemandirian fiskal antar daerah di Jawa Timur, dari daerah yang sangat mandiri seperti Kota Surabaya hingga daerah yang masih sangat bergantung pada transfer pusat, menjadikan provinsi ini sebagai laboratorium yang ideal untuk menganalisis pengaruh PAD, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kemandirian fiskal (Wahyudi et al., 2024).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 38 daerah (29 kabupaten dan 9 kota). Pemilihan Jawa Timur didasarkan pada pertimbangan variasi fiskal yang tinggi, baik dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, maupun belanja modal. Selain itu, Jawa Timur juga konsisten menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diaudit BPK, sehingga data penelitian lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemilihan populasi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya di

provinsi khusus/istimewa yang juga menekankan pentingnya variasi kondisi fiskal antar daerah sebagai dasar pengukuran kemandirian keuangan (Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025; Nurjanah et al., 2024; Syafira Frijunita et al., 2024; Zakiah, 2022).

3.3.2 Sampel

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan sampling tersebut, diperoleh 180 data sampling pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memenuhi syarat dan dijadikan sampel penelitian.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam studi ini menggunakan metode purposive sampling, yakni metode penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria khusus yang ditetapkan peneliti. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti (Hermina & Huda, 2024).

Adapun kriteria sampel antara lain:

- a. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan laporan realisasi APBD secara lengkap selama periode 2020–2024.
- b. Pemerintah daerah yang memiliki data lengkap mengenai PAD, Dana perimbangan, Belanja Modal, Kemandirian Fiskal, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Tabel 3. 1 Tabel *Purposive Sampling*

Keterangan	Jumlah
Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan laporan realisasi APBD secara lengkap selama periode 2020–2024.	38
Pemerintah daerah yang tidak memiliki data lengkap mengenai PAD, Dana perimbangan, Belanja Modal, Kemandirian Fiskal, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	(2)

Jumlah sampel yang dapat digunakan	36
Kurun waktu penelitian	5 Tahun
Total data yang digunakan dalam penelitian	180

Sumber: *Diolah Peneliti, 2025*

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menyajikan laporan realisasi APBD secara lengkap selama periode 2020–2024. Jumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebanyak 38 daerah. Namun, terdapat 2 pemerintah daerah yang tidak dapat dijadikan sampel penelitian, yaitu Kota Pasuruan dan Kabupaten Ponorogo, karena tidak memiliki kelengkapan data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kemandirian Fiskal, dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah selama periode penelitian.

Dengan demikian, jumlah sampel yang memenuhi kriteria penelitian sebanyak 36 pemerintah kabupaten/kota dengan periode pengamatan selama 5 tahun, sehingga total data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 180 data observasi.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data kuantitatif untuk periode tahun 2020–2024 pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, Belanja Modal, Kemandirian Fiskal, dan Pertumbuhan Ekonomi. Seluruh data diperoleh dari laporan resmi yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan juga data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS).

Penggunaan data sekunder dengan periode lima tahun dipilih karena ketersediaannya lengkap dan konsisten untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, sehingga memungkinkan pengujian empiris terhadap pengaruh PAD, Dana perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal dengan Pertumbuhan Keuangan Daerah sebagai moderasi penelitian. Pemanfaatan data sekunder ini juga sejalan dengan penelitian (Fadhila et al., 2025; Hairah et al., 2025;

Nurjanah et al., 2024; Frijunita et al., 2024) menggunakan data APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menganalisis hubungan variabel fiskal terhadap kemandirian daerah.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengolah data sekunder yang relevan dengan variabel penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber resmi pemerintah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

- a. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menyediakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD untuk memperoleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Belanja Modal.
- b. Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai sumber data pertumbuhan ekonomi daerah dan indikator makroekonomi lain yang mendukung analisis kemandirian fiskal.
- c. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, untuk memastikan keandalan dan akurasi data laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit.

Data yang dikumpulkan mencakup periode tahun 2020–2024, sesuai dengan rentang waktu penelitian. Penggunaan studi dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif yang objektif, terverifikasi, serta dapat digunakan untuk analisis hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian (Waruwu et al., 2025).

3.7 Definisi Operasional Variabel

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan variabel independen yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang berasal dari wilayahnya sendiri berdasarkan UU No.1 Pasal 20 Th. 2022. Dalam penelitian ini, PAD diukur berdasarkan jumlah total penerimaan dari empat komponen utama yang tercantum dalam APBD, yaitu pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Data diambil dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) kabupaten/kota pada tahun 2020-2024, dengan satuan pengukuran berupa rupiah. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan} + \text{Lain-lain PAD yang Sah}$$

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan variabel independen yang mencerminkan besarnya kontribusi pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerah. Berdasarkan UU No.1 Pasal 20 Th. 2022 Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah, dan Dana Desa yang keseluruhannya diperoleh dari APBN dan dialokasikan ke pemerintah daerah sendiri. Dana perimbangan atau yang sekarang dikenal dengan Dana Transfer diukur dalam satuan rupiah dan datanya diambil dari dokumen LRA tahun anggaran 2020–2024. Rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$\text{Dana Transfer Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH} + \text{Dana Otonomi Khusus} + \text{Dana Keistimewaan Daerah} + \text{Dana Desa}$$

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan variabel independen yang mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam bentuk pengeluaran yang ditujukan untuk pembentukan atau penambahan aset tetap/inventaris yang memberi manfaat lebih dari satu tahun anggaran berdasarkan UU No.1 Pasal 20 Th. 2022. Komponen belanja modal meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, serta belanja modal fisik lainnya. Seluruh nilai belanja modal diukur dalam rupiah (Rp) berdasarkan realisasi dalam APBD masing-masing kabupaten/kota tahun 2020–2024.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Total Belanja Modal dalam APBD}$$

Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan menggunakan sumber keuangan sendiri tanpa bergantung pada bantuan pihak luar, terutama Pemerintah Pusat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK RI, 2019). Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian fiskal adalah Fiscal Autonomy Index (FAI) atau Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) yang pertama kali diperkenalkan oleh Hunter pada tahun 1977.

Meskipun formula Hunter telah dikembangkan sejak lama, hingga saat ini pendekatan tersebut masih sering digunakan dalam analisis keuangan daerah. Hanya saja, banyak peneliti tidak lagi menyebutnya secara eksplisit sebagai Formula (Hunter, 1977). Rumus awal FAI menilai tingkat kemandirian daerah dengan membandingkan belanja daerah terhadap sumber-sumber pendapatan non-PAD, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Namun, karena formula asli dirancang untuk negara federal dengan tingkat desentralisasi fiskal yang sangat tinggi, penerapannya di negara berkembang seperti Indonesia dapat menimbulkan kendala. Dalam beberapa kasus, indeks kemandirian fiskal dapat bernilai negatif apabila jumlah pendapatan non-PAD (DAU + DAK + Pinjaman Daerah + DBH) lebih besar dibandingkan total belanja daerah, sehingga hasil pengukurannya tidak lagi mencerminkan kondisi sebenarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sejumlah peneliti menyesuaikan formula Hunter dengan menggunakan total pendapatan daerah sebagai proxy untuk belanja (Firdausy, 2017; Sampurna, 2018). Penyesuaian ini dinilai lebih sesuai dengan struktur APBD di Indonesia dan dapat menghasilkan indeks yang lebih stabil serta relevan untuk menggambarkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, perhitungan IKF yang digunakan dalam reviu kemandirian fiskal ini merupakan formula Hunter yang telah disesuaikan, yaitu:

$$IKF = 1 - \frac{TrGP + TrSP + B + REVSH}{REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH}, \text{ dimana:}$$

IKF	= Index Kemandirian Fiskal
REVOR	= Pendapatan Asli Daerah/PAD
TrGP	= General Purpose Transfer/Transfer Umum
TrSP	= Specific Purpose Transfer/Transfer Khusus
B	= Subnational Borrowing/Pinjaman Daerah
REVSH	= Revenue Sharing/Dana Bagi Hasil

Tabel 3.2 Kategori Kemandirian Fiskal

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq IKF < 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF < 0,50$	Menuju kemandirian
3	$0,50 \leq IKF < 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat mandiri

Sumber: BPK RI, 2019

Pertumbuhan Ekonomi (Z)

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan aktivitas ekonomi suatu daerah yang tercermin dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (BPS, 2016). Variabel ini digunakan sebagai moderator untuk menguji apakah dinamika ekonomi daerah dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal Daerah.

$$Pertumbuhan\ Ekonomi = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah pengukuran dan analisis dalam penelitian ini, maka setiap variabel didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.	Total PAD dalam APBD 2020–2024.	$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah + Lain-lain\ PAD$	UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 20
Dana Perimbangan/ Dana Transfer	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Terdiri atas DAU, DAK, dan DBH.	Total Dana Transfer Perimbangan Pusat (Rp) dalam LRA 2020–2024	$Dana\ Transfer = DAU + DAK + DBH + Dana\ Otonomi\ Khusus + Dana\ Keistimewaan\ Daerah + Dana\ Desa$	UU No. 1 Tahun 2022
Belanja Modal	Pengeluaran daerah untuk pembentukan/pembelian aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari	Total Belanja Modal (Rp) dalam APBD	$Belanja\ Modal = Pengeluaran\ untuk\ aset\ tetap\ (tanah,\ gedung,\ jalan,\ peralatan,\ dll)$	Permen dagri Nomor 77 Tahun 2020

Variabel	Definisi	Indikator	Rumus	Sumber
	satu tahun anggaran.	2020–2024.		
Kemandirian Fiskal Daerah (Y)	Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri urusan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada pemerintah pusat.	Rasio IKF	$IKF = 1 - \frac{(TrGP + TrSP + B + REVSH)}{(REVOR + TrGP + TrSP + B + REVSH)}$	Laporan Hasil Pemeriksaan (BPK RI, 2019)
Pertumbuhan Ekonomi (Z)	Peningkatan nilai output barang dan jasa suatu daerah yang mencerminkan perkembangan ekonomi dalam periode tertentu.	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan.	$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$	(BPS, 2016)

Sumber: Diolah Peneliti, 2025

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik kajian data yang digunakan dalam observasi berikut yakni kajian statistik dengan pengolahan data menggunakan bantuan perangkat lunak statistik, yaitu Eviews12. Adapun beberapa pendekatan analisis data yang diterapkan, seperti analisis regresi untuk mengidentifikasi kaitan pada variabel-variabel penelitian, pengujian statistik dalam mengukur signifikansi hasil observasi, dan kajian deskriptif

dalam pemberian gambaran umum mengenai data. Adapun beberapa pendekatan analisis data diterapkan, seperti:

3.8.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode dalam mendeskripsikan, meringkas, dan melakukan analisis data dengan format yang dapat dimengerti dengan mudah (Putranto, 2022). Ini melibatkan penghitungan ukuran statistik yaitu mean (rata-rata), median, mode, standar deviasi, serta lain-lain dalam pemberian gambaran umum tentang karakteristik data yang dikumpulkan.

3.8.2 Analisis Pemilihan Model

Regresi data panel memungkinkan intersep dan slope bervariasi antara perusahaan dan periode waktu. Wibowo (2025) menyatakan bahwa terdapat tiga metode untuk mengestimasi parameter model data panel, ialah:

1. *Common Effect Model* (CEM)

Metode berikut yaitu paling sederhana untuk estimasi parameter model data panel, dengan menyatukan data cross section serta time series selaku satu kesatuan, tanpa melihat 47 ketidaksamaan waktu serta individu. Metode yang digunakan pada model ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS).

2. *Fixed Effect Model* (FEM)

Metode berikut mengestimasi data panel memakai variabel dummy dalam mengetahui ketidaksamaan intersep. Teknik berikut mengandalkan terdapat perbedaan intersep antar industri, namun intersepnnya konsisten sepanjang waktu. Model berikut juga mengartikan jika koefisien regresi (slope) tetap konstan antar industri serta waktu. Pendekatan yang dipakai yaitu metode *Least Square Dummy Variable* (LSDV).

3. *Random Effect Model* (REM).

Metode berikut mengestimasi data panel di mana variabel permasalahan memiliki hubungan pada waktu serta pada individu. Perbedaan pada individu serta waktu digolongkan melewati error. Dikarenakan adanya korelasi pada variabel gangguan, teknik OLS tidak bisa dipakai, sehingga model random effect dengan teknik *Generalized Least Square* (GLS).

Ada tiga uji yang digunakan dalam pemilihan metode estimasi data panel, yakni “pengujian Chow (pengujian statistik F), pengujian Hausman, serta pengujian *Lagrange Multiplier*”.

1. Pengujian chow, ialah uji dalam penentuan FEM maupun CEM yang paling sesuai dipakai untuk estimasi data panel. Mengambil keputusan dilaksanakan apabila, Skor prob. $F < 0,05$ sehingga model yang dipakai FEM. Namun apabila skor prob. $F > 0,05$ sehingga model yang dipakai CEM.
2. Pengujian Hausman, yakni uji statistik yang dipakai untuk penentuan apakah model FEM maupun REM lebih tepat dipakai. Keputusan diambil berdasarkan, Skor probabilitas *chi squares* $< 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni FEM. Namun jika skor probabilitas *chi squares* $> 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni REM.
3. Pengujian *Lagrange Multiplier* (LM), yaitu metode guna penentuan apakah model REM lebih sejalan daripada dengan CEM. Keputusan diambil berdasarkan, apabila Skor p value $< 0,05$ sehingga model yang 48 dipakai yakni REM. Sebaliknya, jika p value $> 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni CEM.

3.8.3 Analisis Regresi Data Panel

Analisis data panel yaitu kombinasi data runtun waktu (time series data) serta data silang (*cross section data*) yang mencakup dimensi waktu dan ruang (Sihombing et al., 2021). Data panel juga dikenal sebagai *pooled data* (penggabungan *time series* serta *cross section*), *micro panel data*, *longitudinal data*, *event history analysis*, serta *cohort analysis* (Sihombing et al., 2021). Beberapa keunggulan penggunaan data panel antara lain total penelitian yang lebih besar, estimasi parameter yang lebih tepat, penyediaan data yang lebih informatif, pengurangan kolinearitas antar variabel, serta peningkatan derajat kebebasan atau efisiensi (Basuki, 2021). Pada observasi berikut, kajian data panel diterapkan dalam penilaian variabel dependen yakni Kinerja Keuangan, bersama pada variabel independen lainnya. Berikut adalah model persamaan regresi data panel :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

Y	= Kemandirian fiskal
α	= Konstanta
β	= Koefisien regresi
X1	= Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2	= Belanja Modal (BM)
X3	= Dana Perimbangan (DP)
e	= error, variabel pengganggu
i	= Kabupaten/Kota di Jawa Timur
t	= Periode/waktu

3.8.4 Uji Asumsi Klasik

3.8.4.1 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas diuji ketika model regresi melibatkan lebih dari satu variabel independen. Akibat terdapat multikolinearitas, banyak variabel independen mungkin tidak signifikan dalam memberi pengaruh variabel dependen, meskipun koefisien determinasi tetap tinggi. Cara dalam memperkirakan multikolinearitas termasuk *Variance Inflation Factor* (VIF) serta korelasi berpasangan. Metode korelasi berpasangan lebih bermanfaat dikarenakan penulis dalam memahami dengan jelas variabel independen mana yang mempunyai korelasi kuat (Yanti & Hamzah, 2024). Berlandaskan Widarjono (2007) mengambil keputusan teknik korelasi berpasangan dilaksanakan saat:

- Skor korelasi pada setiap variabel bebas $< 0,85$ sehingga tidak terdapat masalah multikolinieritas.
- Skor korelasi pada setiap variabel bebas $> 0,85$ sehingga terdapat masalah multikolinieritas.

3.8.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian *Modified Wald Test* digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi data panel, khususnya pada model *Fixed Effects*. Uji ini dikembangkan untuk menguji apakah variansi error antar unit cross-section bersifat konstan atau berbeda. Dalam pelaksanaannya, *Modified Wald*

menghitung ragam residual untuk setiap unit cross-section dan kemudian membandingkannya dengan variansi yang diharapkan di bawah asumsi homoskedastisitas. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi yang kecil (umumnya $< 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa variansi error tidak konstan sehingga terjadi heteroskedastisitas, yang menyebabkan estimator OLS kehilangan sifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Sebaliknya, jika hasil uji menunjukkan bahwa residual bersifat homoskedastik, maka variansi error tetap konstan dan metode OLS tetap efisien. Menurut Wibowo (2025) keberadaan heteroskedastisitas akan membuat varians dari estimasi menjadi bias sehingga diperlukan pengujian untuk memastikan keandalan model.

3.8.5 Uji Hipotesis

3.8.5.1 Uji R² atau Koefisien Determinasi

Koefisien R² mengukur tingkat kesesuaian model regresi, dalam skor dalam 0 sampai 1. Bertambah tinggi skor R², bertambah baik model tersebut terhadap menjelaskan varians variabel dependen. Apabila nilai R² rendah, maka faktor independen tidak cukup menjelaskan varians pada variabel dependen. Dalam pengujian R², skor yang lebih besar menunjukkan kualitas model yang lebih baik, karena perbedaan pada variabel dependen dapat dikaitkan dengan variabel independen. Dengan demikian, model yang memiliki R² tinggi diasumsikan lebih presisi. Koefisien determinasi menunjukkan tingkat informasi yang disediakan oleh variabel independen terkait perbedaan pada variabel dependen. *Adjusted R Square* dipakai untuk analisis dengan lebih dari 2 variabel independen, 51 sedangkan R Square digunakan untuk mengukur proporsi variabel yang diuji jika melibatkan satu atau dua variabel independen (Basuki, 2021).

3.8.5.2 Uji Statistik T (*Parsial*)

Uji T bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam regresi linier berganda, penting untuk mengetahui kontribusi setiap variabel bebas karena masing-masing dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap model. Untuk menentukan apakah suatu variabel bebas (X) memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap variabel terikat (Y), digunakan nilai signifikansi. Jika nilai signifikansi (Sig) lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dianggap memiliki pengaruh signifikan (Basuki, 2021).

3.8.6 *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Pengujian ini mempunyai tujuan dalam memahami bagaimana variabel moderasi dapat didukung maupun melemahkan dampak variabel independen pada variabel dependen (Liana, 2009). Model persamaan uji moderasi pada observasi berikut dapat dirumuskan dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 \times Z) + \beta_6 (X_2 \times Z) + \beta_7 (X_3 \times Z) + e$$

Keterangan:

- Y = Kemandirian Fiskal
- X1 = Penghasilan Asli Daerah
- X2 = Dana Perimbangan
- X3 = Belanja Modal
- Z = Pertumbuhan Ekonomi
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_6$ = Koefisien Regresi
- e = Level Kesalahan (error)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menjadikan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur sebagai objek penelitian. Pemerintah daerah kabupaten dan kota merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran penting dalam mengelola sumber-sumber pendapatan daerah serta mengalokasikan belanja daerah untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya Laporan Realisasi Anggaran (LRA), serta data pertumbuhan ekonomi yang dipublikasikan oleh BPS. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2020 hingga 2024.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Dari teknik ini, diperoleh sebanyak 36 kabupaten dan kota yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama lima tahun dan jumlah sampel sebanyak 36 kabupaten dan kota, maka total data observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 180 sampel data panel, sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Data Objek Penelitian

No	Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Bangkalan
2	Kabupaten Banyuwangi
3	Kabupaten Blitar
4	Kabupaten Bojonegoro
5	Kabupaten Bondowoso
6	Kabupaten Gresik
7	Kabupaten Jember
8	Kabupaten Jombang
9	Kabupaten Kediri
10	Kabupaten Lamongan
11	Kabupaten Lumajang
12	Kabupaten Madiun
13	Kabupaten Magetan
14	Kabupaten Malang
15	Kabupaten Mojokerto
16	Kabupaten Nganjuk
17	Kabupaten Ngawi
18	Kabupaten Pacitan
19	Kabupaten Pamekasan
20	Kabupaten Pasuruan
21	Kabupaten Probolinggo
22	Kabupaten Sampang
23	Kabupaten Sidoarjo
24	Kabupaten Situbondo
25	Kabupaten Sumenep
26	Kabupaten Trenggalek
27	Kabupaten Tuban
28	Kabupaten Tulungagung
29	Kota Batu
30	Kota Blitar
31	Kota Kediri
32	Kota Madiun
33	Kota Malang
34	Kota Mojokerto
35	Kota Probolinggo
36	Kota Surabaya

Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah, dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel moderasi.

Analisis dilakukan menggunakan metode regresi data panel untuk memperoleh gambaran mengenai hubungan antara variabel independen, variabel dependen, serta peran variabel moderasi dalam mempengaruhi kemandirian fiskal pemerintah daerah.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yaitu pengujian yang dipakai ketika mengidentifikasi nilai terkecil, nilai terbesar, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi pada setiap variabel yang dipakai dalam model penelitian. Pada penelitian ini, variabel kinerja keuangan diproksikan dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independen terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) yang telah ditransformasikan dalam bentuk logaritma natural.

Dibawah berikut yaitu hasil output pada analisis statistik deskriptif.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	IKF	PE	PAD	DP	BM
Mean	0.24	2,83	6.04E+11	1.52E+12	3.98E+11
Median	0.22	4,31	3.58E+11	1.44E+12	2.88E+11
Maximum	0.68	8,88	6.11E+12	4.41E+12	2.30E+12
Minimum	0.02	-6,46	1.02E+11	5.44E+11	6.94E+10
Observations	180	180	180	180	180

Sumber: Hasil Uji Eviews 12, 2026 (dalam milyar rupiah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Gambar 4.1, informasi mengenai variabel penelitian telah dikumpulkan, yaitu:

1. Pada variabel Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) memiliki nilai maksimum sebesar 0,68 yang merupakan Kota Surabaya tahun 2021. Nilai minimum sebesar 0,02 yaitu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024. Skor rata-rata (mean) sebesar 0,24.
2. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai maksimum sebesar 6.114.390.000.000 yang merupakan Kota Surabaya tahun 2024.

Nilai minimum sebesar 102.240.000.000 yaitu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 . Skor rata-rata (mean) sebesar 604.096.096.150.503.

3. Dana Perimbangan memiliki nilai maksimum sebesar 4.412.764.834.036 yang merupakan Kabupaten Bojonegoro tahun 2023. Nilai minimum sebesar 543.918.164.967 yaitu Kota Mojokerto tahun 2020. Skor rata-rata (mean) sebesar 1.523.428.958.192.
4. Belanja Modal memiliki nilai maksimum sebesar 2.302.500.000.000 yang merupakan Kabupaten Sumenep tahun 2023. Nilai minimum sebesar 69.350.000.000 yaitu Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 . Skor rata-rata (mean) sebesar 398.471.195.000.
5. Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai maksimum sebesar 8,88 yang merupakan Kabupaten Tuban tahun 2022. Nilai minimum sebesar 6,46 yaitu Kota Batu tahun 2020. Skor rata-rata (mean) sebesar 2,83.

4.1.3 Pemilihan Model Terbaik

4.1.3.1 Uji Chow

Pengujian Chow digunakan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Keputusan diambil dengan melihat nilai probabilitas pada *cross-section F* maupun *cross-section Chi-square*. Apabila nilai prob. $F > 0,05$, maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Namun apabila prob. $F < 0,05$, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.420731	(35,141)	0.0000
Cross-section Chi-square	331.789772	35	0.0000

Berdasarkan hasil pengujian Chow pada tabel di atas, nilai cross-section F memiliki probabilitas sebesar 0.0000 dan nilai cross-section Chi-square juga

menunjukkan probabilitas sebesar 0.0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ($p = 0.0000 < 0.05$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan hasil tersebut, maka pengujian pemilihan model selanjutnya dilanjutkan dengan Uji Hausman untuk menentukan apakah model yang lebih tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* atau *Random Effect Model*.

4.1.3.2 Uji Hausman

Pengujian Hausman dilakukan dalam memilih model yang paling sesuai antara “*Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM)” untuk dipakai. Keputusan diambil berdasarkan skor probabilitas *Cross-section random*. Jika skor $p < 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni FEM. Namun jika skor $p > 0,05$ sehingga model yang dipakai yaitu REM.

Tabel 4. 4 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.688895	3	0.0825

Sumber: Hasil Uji Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil pengujian Hausman pada tabel di atas, diperoleh nilai *cross-section random* dengan Chi-Square sebesar 6.688895, derajat kebebasan (df) sebesar 3, dan nilai probabilitas sebesar 0.0825. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ($0.0000 > 0.05$).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model yang terpilih berdasarkan Uji Hausman adalah *Random Effect Model* (REM).

4.1.3.2 Uji LM

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam analisis data panel. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan model *Common Effect Model* (CEM). Keputusan diambil berdasarkan, apabila Skor p value $< 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni REM. Sebaliknya, jika p value $> 0,05$ sehingga model yang dipakai yakni CEM.

Tabel 4.5 Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	219.8075 (0.0000)	0.803562 (0.3700)	220.6111 (0.0000)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, nilai Breusch-Pagan dengan probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang terpilih adalah *Random Effect Model*.

4.1.4 Uji Asumsi Klasik

4.1.4.1 Uji Multikolinieritas

Penelitian ini melakukan pengujian multikolinearitas untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas dapat menjadi permasalahan dalam analisis regresi karena dapat menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakakuratan pada estimasi koefisien regresi. Oleh karena itu, pengujian multikolinearitas perlu dilakukan agar model regresi yang digunakan memenuhi asumsi klasik.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas menggunakan matriks korelasi, yaitu apabila nilai korelasi antar variabel independen lebih kecil dari 0,85, maka dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami multikolinearitas.

Tabel 4. 6 Uji Multikolinieritas

	PAD	DP	BM
PAD	1.000000	0.389207	0.606242
DP	0.389207	1.000000	0.731795
BM	0.606242	0.731795	1.000000

Sumber: Hasil Uji Eviews 12, 2026

Berdasarkan hasil output korelasi pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai korelasi antar variabel utama penelitian seperti PAD dengan DP sebesar 0.389207, DP dengan BM sebesar 0.731795, serta BM dengan DP sebesar 0.731795 menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 0,85. Hal ini mengidentifikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinieritas dalam variabel independen.

4.1.5 Regresi Data Panel

Pendekatan dalam observasi berikut memakai regresi data panel, yang menyatukan data cross-section serta time series untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dengan lebih mendalam. Observasi berikut memanfaatkan data time series dalam lima tahun, mulai 2020 hingga 2024, untuk melakukan analisis. Selain itu, observasi berikut dengan data cross-section pada 36 Kabupaten/Kota di Indonesia yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan. Hasil kajian model regresi menunjukkan jika pendekatan terbaik yang dihunakan yakni Random Effect Model. Penggunaan Random Effect Model juga memberikan keunggulan dalam efisiensi estimasi karena menggunakan metode Generalized Least Square (GLS), sehingga mampu menghasilkan estimasi yang lebih baik ketika terdapat variasi antar individu (daerah). Selain itu, REM memungkinkan generalisasi hasil penelitian yang lebih luas karena mengasumsikan bahwa sampel yang digunakan merupakan representasi dari populasi yang lebih besar.

Dengan demikian, penggunaan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model dalam penelitian ini dinilai tepat karena mampu menangkap variasi data secara lebih komprehensif, baik dari sisi waktu maupun antar daerah, serta memberikan hasil estimasi yang lebih efisien dan reliabel dalam menjelaskan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kemandirian Fiskal.

Tabel 4.7 Tabel Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.270772	0.017058	15.87364	0.0000
PAD	1.37E-13	1.22E-14	11.27659	0.0000
DP	-7.92E-14	1.13E-14	-6.997862	0.0000
BM	2.40E-14	2.16E-14	1.108775	0.2691

Berdasarkan hasil pengujian regresi, diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$IKF=0,273979+1,37E-13PAD-7,92E-14DP-2,40E-14BM$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan hubungan antara variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) terhadap Indeks Kemandirian Fiskal (IKF).

1. Nilai konstanta sebesar 0,270772 dengan nilai probabilitas $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebesar 0,270772 atau sekitar 27,08%.
2. Variabel PAD memiliki nilai koefisien regresi sebesar $1,37E-13$ dengan nilai t-statistic sebesar 11,27659 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Nilai koefisien yang positif menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IKF. Artinya, peningkatan PAD akan meningkatkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IKF dapat diterima.
3. Variabel Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-7,92E-14$ dengan nilai t-statistic sebesar -6,997862 dan probabilitas $0,0000 < 0,05$. Nilai koefisien yang negatif menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap IKF. Artinya, semakin besar ketergantungan daerah terhadap Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung menurun. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh terhadap IKF diterima dengan arah hubungan negatif.
4. Variabel Belanja Modal memiliki nilai koefisien regresi sebesar $2,40E-14$ dengan nilai t-statistic sebesar 1,108775 dan probabilitas $0,2691 > 0,05$. Nilai koefisien menunjukkan arah positif, namun secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti perubahan Belanja Modal belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap IKF ditolak.

4.1.7 Uji Hipotesis

4.1.7.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai (t -hitung) $> t$ -tabel (1,97) dan nilai probabilitas (p -value) $< 0,05$, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IKF.

Tabel 4. 7 Uji Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.270772	0.017058	15.87364	0.0000
PAD	1.37E-13	1.22E-14	11.27659	0.0000
DP	-7.92E-14	1.13E-14	-6.997862	0.0000
BM	2.40E-14	2.16E-14	1.108775	0.2691

Sumber: Hasil Uji Eviews 12, 2026

Berdasarkan Hasil Uji pada Gambar 4.7, dapat diketahui bahwa:

- 1.) “Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t -statistic sebesar $11,27 > 1,97$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Artinya, semakin tinggi PAD yang diperoleh daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskalnya.
- 2.) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Perimbangan (DP) memiliki nilai t -statistic sebesar $-6,99 < -1,97$ dan nilai probabilitas sebesar $0,0000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKF. Artinya, semakin besar dana transfer dari pemerintah pusat, maka tingkat kemandirian fiskal daerah cenderung menurun.
- 3.) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal (BM) memiliki nilai t -statistic sebesar $1,108 < 1,97$ dan nilai probabilitas sebesar $0,2691 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap IKF. Dengan demikian, peningkatan belanja modal belum mampu secara langsung meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

4.1.7.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen, yaitu Indeks Kinerja Keuangan Fiskal (IKF), yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model penelitian.

Tabel 4. 8 Uji Kofisien Determinasi

R-squared	0.566561
Adjusted R-squared	0.548921
S.E. of regression	0.023802
F-statistic	32.11810
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Hasil Eviews, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,471648 menunjukkan bahwa 54,89% variasi IKF dapat dijelaskan oleh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal, sedangkan sisanya 56,65% dipengaruhi variabel lain di luar model.

4.1.8 Uji Moderasi (*Moderated Regression Analysis*)

Uji Moderasi dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Pengujian ini dilakukan dengan menambahkan variabel interaksi antara variabel independen dan variabel moderasi ke dalam model regresi.

Tabel 4. 9 Uji MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.270772	0.017058	15.87364	0.0000
PAD	1.37E-13	1.22E-14	11.27659	0.0000
DP	-7.92E-14	1.13E-14	-6.997862	0.0000
BM	2.40E-14	2.16E-14	1.108775	0.2691
PE	0.004052	0.001299	3.118451	0.0021
PAD_PE	-2.91E-16	1.30E-15	-0.223207	0.8236
DP_PE	3.64E-16	1.21E-15	0.301473	0.7634
BM_PE	-9.38E-15	4.11E-15	-2.283273	0.0236

Berdasarkan hasil penelitian pada gambar 4.9, diketahui bahwa :

- 1.) “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa memoderasi hubungan penghasilan pendapatan asli daerah terhadap indeks keuangan fiskal. Hal ini dibuktikan oleh nilai probabilitas sebanyak $0,8236 > 0,05$ ”.
- 2.) “Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bisa memoderasi hubungan antara dana perimbangan terhadap indeks kemandirian fiskal. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitasnya yang sebesar $0,7634 > 0,05$ ”.
- 3.) “Temuan selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan antara belanja modal dengan indeks keuangan fiskal. Ditunjukkan melalui angka probabilitasnya sebesar $0,0236 < 0,05$ ”.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), ditunjukkan dengan hasil uji regresi data panel pada tabel 4.7 dimana koefisien sebanyak 1,25 serta level probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$. Temuan ini sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan internal akan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat. Kabupaten/kota dengan kapasitas PAD tinggi seperti Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik cenderung memiliki kemampuan pembiayaan yang lebih mandiri dibanding daerah dengan basis ekonomi yang terbatas. Temuan ini mendukung penelitian Fadhila et al. (2025) dan Hairah et al. (2025). Hasil ini juga menegaskan bahwa peningkatan PAD mampu memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri. Dalam perspektif *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), temuan ini mengidentifikasikan adanya kecenderungan menuju Hard Budget Constraint, dimana pemerintah daerah terdorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai respon terhadap keterbatasan kapasitas fiskal dan menurunnya ketergantungan terhadap transfer pusat (Oates, 2005)

Menurut Martinez-Vazquez & McNab (2003), Pendapatan yang bersumber dari daerah merupakan salah satu indikator utama *fiscal autonomy* karena mencerminkan kapasitas fiskal riil dan *local fiscal effort*. Semakin besar proporsi pendapatan yang dapat dikendalikan secara mandiri, semakin tinggi pula derajat otonomi fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut. Dalam perspektif tersebut, peningkatan PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menginternalisasi sumber daya ekonomi lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pusat.

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya oleh (Dian & Farouq, 2022; Kristina et al., 2021; Malau & Simarmata, 2020; Nurjanah et al., 2024; Sefira & Budiwitjaksono, 2022; Syafira Frijunita et al., 2024; Zakiah, 2022) yang mengungkapkan bahwa daerah dengan kapasitas PAD yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dengan kata lain, peningkatan PAD mencerminkan adanya optimalisasi potensi ekonomi lokal yang berkontribusi langsung terhadap penguatan struktur keuangan daerah.

4.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.7 dimana koefisien sebanyak -6,37 serta level probabilitas (prob) $0,00 < 0,05$. Menunjukkan bahwa peningkatan Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IKF. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat, maka kemandirian fiskal cenderung menurun. Dalam perspektif *Second-Generation Fiscal Federalism* (SGFF), kondisi ini dijelaskan melalui konsep *soft budget constraint*, kondisi di mana pemerintah daerah memiliki ekspektasi bahwa kekurangan fiskal akan ditutupi oleh pemerintah pusat melalui mekanisme transfer seperti dana perimbangan (Oates, 2005; Rodden et al., 2003). Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumen dalam SGFF bahwa desain transfer fiskal yang tidak tepat dapat menciptakan *soft budget constraint* yang pada akhirnya melemahkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang

mampu menyeimbangkan antara dukungan fiskal dari pemerintah pusat dan dorongan bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas secara berkelanjutan.

4.2.3 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Kemandirian Fiskal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki nilai koefisien sebesar $2,40E-14$ dengan nilai probabilitas sebesar 0,2691. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 5% ($0,2691 > 0,05$), sehingga Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Kemandirian Fiskal ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan maupun penurunan Belanja Modal yang dilakukan pemerintah daerah belum mampu meningkatkan tingkat kemandirian fiskal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan kata lain, besarnya alokasi Belanja Modal belum secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya melalui sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara konseptual, Belanja Modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila dilaksanakan secara efektif, Belanja Modal dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan potensi penerimaan daerah di masa mendatang.

Namun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa manfaat Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal tidak dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek. Infrastruktur yang dibangun melalui Belanja Modal umumnya membutuhkan waktu untuk menghasilkan dampak ekonomi yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akibatnya, peningkatan Belanja Modal pada periode penelitian belum mampu mendorong peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal secara signifikan.

Ditinjau dari perspektif *Second Generation Theory of Fiscal Federalism* (SGFF), pengeluaran pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas dan efisiensi penggunaannya. Belanja Modal yang besar tidak secara otomatis meningkatkan kemandirian fiskal apabila belum mampu menghasilkan tambahan kapasitas fiskal atau meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan lokal. Oleh karena itu, kualitas pengelolaan Belanja Modal menjadi faktor yang lebih penting dibandingkan besarnya alokasi anggaran semata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nina Andriana (2020), Eve Ida Malau dan Parapat (2020), Syafira Frijunita et al. (2024), serta Hairah et al. (2025) yang menemukan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan masih memerlukan waktu yang lebih panjang untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal.

Pada konteks kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, kondisi ini dapat terjadi karena sebagian Belanja Modal masih difokuskan pada penyediaan fasilitas pelayanan publik yang manfaatnya lebih bersifat sosial dibandingkan fiskal. Akibatnya, meskipun Belanja Modal meningkat, peningkatan tersebut belum secara langsung meningkatkan penerimaan daerah maupun mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat. Oleh karena itu, Belanja Modal belum mampu menjadi faktor yang menentukan peningkatan Indeks Kemandirian Fiskal selama periode penelitian 2020–2024.

4.2.4 Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pengaruh PAD terhadap IKF

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel interaksi PAD_PE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8236 yang lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Kemandirian Fiskal sehingga hipotesis penelitian ditolak.

Secara teoritis, *Second Generation Theory of Fiscal Federalism* (SGFF) menjelaskan bahwa pemerintah daerah akan terdorong untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah yang dimiliki. Dalam teori ini, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian fiskal lebih ditentukan oleh keberhasilan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan PAD dibandingkan oleh perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, ketika PAD meningkat, kemandirian fiskal tetap meningkat terlepas dari kondisi pertumbuhan ekonomi daerah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya mampu dikonversi menjadi tambahan penerimaan daerah. Meskipun aktivitas ekonomi meningkat, peningkatan tersebut belum tentu diikuti oleh peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, maupun pengelolaan aset daerah yang menjadi komponen PAD. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak mampu memperkuat hubungan antara PAD dan kemandirian fiskal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah et al. (2024) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan variabel fiskal terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian Hairah et al (2025) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan objek penelitian, periode penelitian, serta karakteristik fiskal daerah yang diteliti.

4.2.5 Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pengaruh Dana Perimbangan terhadap IKF

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel interaksi DP_PE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7634 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Indeks Kemandirian Fiskal sehingga hipotesis penelitian ditolak.

Menurut *Second Generation Theory of Fiscal Federalism*, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat dapat menimbulkan kondisi *soft budget constraint*. Dalam kondisi tersebut, pemerintah daerah cenderung memiliki insentif yang lebih rendah untuk mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah karena kebutuhan fiskalnya dapat dipenuhi melalui transfer dari pemerintah pusat.

Tidak signifikannya variabel moderasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengubah hubungan antara Dana Perimbangan dan kemandirian fiskal. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi, daerah tersebut masih dapat bergantung pada transfer pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan fiskalnya. Sebaliknya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah belum tentu memiliki ketergantungan yang lebih besar terhadap Dana Perimbangan.

Temuan ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Perimbangan lebih dipengaruhi oleh kebijakan transfer fiskal pemerintah pusat dibandingkan oleh kondisi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan ekonomi belum mampu mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap transfer pusat secara signifikan.

Hasil penelitian ini memperkuat argumentasi SGFF bahwa peningkatan kapasitas ekonomi daerah tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kemandirian fiskal apabila pemerintah daerah masih mengandalkan transfer fiskal sebagai sumber utama pendanaan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi belum mampu berperan sebagai faktor yang memperkuat ataupun memperlemah hubungan Dana Perimbangan terhadap kemandirian fiskal.

4.2.6 Peran Pertumbuhan Ekonomi dalam Memoderasi Pengaruh Belanja Modal terhadap IKF

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel interaksi BM_PE memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0236 yang lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif sebesar -9,38E-15. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Kemandirian Fiskal dengan arah negatif atau memperlemah sehingga hipotesis penelitian diterima.

Secara teoritis, Belanja Modal merupakan investasi pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila dialokasikan secara efektif, Belanja Modal diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi daerah yang pada akhirnya memperkuat kemandirian fiskal.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi justru memperlemah hubungan antara Belanja Modal dan kemandirian fiskal. Temuan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tidak sepenuhnya berasal dari efektivitas Belanja Modal pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat didorong oleh berbagai faktor lain, seperti perkembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, jasa, investasi swasta, maupun konsumsi rumah tangga yang kontribusinya lebih besar dibandingkan pengeluaran Belanja Modal pemerintah daerah.

Akibatnya, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, kontribusi Belanja Modal terhadap peningkatan kemandirian fiskal menjadi relatif lebih kecil. Kondisi ini menjelaskan mengapa variabel interaksi BM_PE memiliki arah negatif dan signifikan. Dengan kata lain, Pertumbuhan Ekonomi berperan sebagai faktor yang memperlemah pengaruh Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan (Nurjanah et al., 2024) dan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Belanja Modal belum tentu mampu meningkatkan kemandirian fiskal apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas pendapatan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga memperlihatkan

bahwa manfaat Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal cenderung bersifat jangka panjang sehingga pengaruhnya belum sepenuhnya tercermin dalam periode penelitian 2020–2024.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), serta peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dan uji moderasi, diperoleh beberapa temuan utama.

Berdasarkan hasil penelitian pada 36 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2020–2024, diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber lokal, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki. Sebaliknya, Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian fiskal, yang mengindikasikan bahwa tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat cenderung menurunkan tingkat kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian fiskal karena manfaat investasi pemerintah daerah belum dapat dirasakan secara langsung dalam jangka pendek.

Hasil pengujian moderasi menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi belum mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal. Artinya, daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi cenderung belum selalu dapat dipastikan mengoptimalkan PAD untuk meningkatkan kemandirian fiskalnya. Namun, Pertumbuhan Ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap kemandirian fiskal, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer tetap menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi rendahnya kemandirian fiskal daerah.

Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi juga terbukti mampu memperkuat pengaruh Belanja Modal terhadap kemandirian fiskal. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas Belanja Modal dalam meningkatkan kemandirian fiskal akan

lebih optimal apabila didukung oleh kondisi ekonomi daerah yang tumbuh dengan baik. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa optimalisasi PAD dan peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor penting dalam mendorong kemandirian fiskal daerah, sedangkan ketergantungan terhadap Dana Perimbangan masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kemandirian fiskal, seperti kualitas belanja daerah, efisiensi anggaran, kapasitas kelembagaan, serta tata kelola keuangan daerah agar hasil penelitian lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang serta memperluas cakupan wilayah penelitian, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih representatif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
3. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode analisis yang lebih beragam, mengkaji lebih dalam peran variabel moderasi atau mediasi lainnya, serta dapat mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kemandirian fiskal daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(3), 105–113. <http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php>].

Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel Dalam*.

Boadway, R., Roberts, S., & Shah, A. (1994). *Fiscal Federalism Dimensions of Tax Reform in Developing Countries* (Issue November).

BPK RI. (2019). *Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019*.

BPS. (2016). *Analisis pertumbuhan ekonomi*.

Dalisawintri, S. E., Noor, H. M., & Irawan, B. (2025). *Strategi Pemerintah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)*.

Fadhila, L. S., Susilowati, D., Ekonomi, F., & Soedirman, U. J. (2025). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021)*.

Firdausy, C. M. (2017). *Prolog: Peningkatan PAD dan Pembangunan Nasional*. In C. M. Firdausy (Ed.), *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Hairah, W., Maksum, A., & Erwin, K. (2025). The Effect of Regional Original Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), Specific Allocation Fund (DAK) and Capital Expenditure on the Level of Financial Independence of Regions with Economic Growth as a Moderating Variable in Regency/City Government. *International Journal of Research and Review*, 12(1), 84–100. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250112>

Hastuti, P. (2018). *Desentralisasi fiskal dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di indonesia*. 784–799.

Hunter, J. S. H. (1977). *Federalism and fiscal balance: a comparative study*.

Ike, M., Safitri, D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). *Indonesian Treasury*

Review. 6, 85–96.

Kementerian Keuangan. (2012). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran.

Kementrian. (2020). *Permendagri No.77 Thn. 2020*.

Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Siwu, H. F. D. J., Pendapatan, P., Daerah, A., Dan, P. A. D., Perimbangan, D., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. J. (2021). *Kabupaten Halmahera Tengah The Effect Of Local Revenue (Pad) And Balancing Funds On The Regional Financial Independence Of Central Halmahera District Jurnal EMBA Vol . 9 No . 1 Januari 2021 , Hal . 453-461*. 9(1), 453–461.

Liana, L. (2009). *Penggunaan MRA dengan Spss untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen*. XIV(2), 90–97.

Malau, E. I., & Simarmata, E. P. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK&BI)*, 3(2), 332–337. <https://doi.org/10.37600/ekbi.v3i2.196>

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.

Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. (2003). *Fiscal Decentralization and Economic Growth*.

Musfirati, A., & Sugiyanto, H. (2021). *Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan dana keistimewaan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah*. 5, 20–36.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance In Theory And Practice*.

Nurjanah, R., Triantoro, A., & Hardiana, R. D. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Provinsi Jawa Barat dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research*, 3(3), 268–278. <https://ejournal.upi.edu/index.php/fineteach>

- Oates, W. E. (2005). *Toward A Second-Generation Theory of*. 1997, 349–373.
- Olt, E. R. I. C. M. Z., Ird, R. I. M. B., Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). *School of Law Law & Economics Research Paper Series Redistribution Via T Axation : T He L Imited R Ole Of The P ersonal I Ncome T Ax In D Eveloping C Ountries And*. 05.
- Peraturan Pemerintah Pusat. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014*.
- Pemerintah Pusat. (2022). *Jurnal Budget* (Vol. 7, Issue 1).
- Peraturan Pemerintah Pusat. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*.
- Permana, Y. H., & Wika, G. S. M. J. (2013). *Testing The Existence Of Wagner Law And Government*. 1883.
- Putranto, P. (2022). Uji Statistik pada Analisis Deskriptif, Asosiatif dan Komparatif. In *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka Grup.
- Rodden, J., Eskeland, G. S., & Litvack, J. I. (2003). *Fiscal decentralization and the challenge of hard budget constraints*. MIT press.
- Rustiny, E. (2024). *Governance Decentralization in The Fiscal of Rural Cooperation in Indonesia , A Literature Review*. Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-465-5>
- Sampurna, A. F. (2018). *Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal, 18*.
- Sefira, M. V. P., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis PAD dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jawa Timur 2019-2020. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(3), 938–948.
- Setianda, R. A., Suwarno, T. E., Abdillah, M. R., Hadiani, Y., Laoli, V., Pulungan, F. F., Muthmainah, R., Tora, A. S., Sinaga, B., Negeri, P., Laut, T., & Infrastruktur, I. (2025). *Menata APBD , Membangun Daerah : Menuju Kemandirian Fiskal Melalui Efisiensi Anggaran Serta Investasi Infrastruktur Pada Kabupaten Tanah Laut*. 48–54. <https://doi.org/10.47709/jap.v5n1.6215>
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al- Misbah*.

- Sihombing, P. R., St, S., Stat, M., & Ps, C. (2021). *Analisis Regresi Data Panel*.
- Syafira Frijunita, Gurendrawati, E., & Utaminingtyas, T. H. (2024). Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 5(2), 256–269. <https://doi.org/10.21009/japa.0502.02>
- Wagner, A. (1883). *Finanzwissenschaft: in einzelnen selbständigen Abtheilungen. Einleitung, Ordnung der Finanzwirthschaft, Finanzbedarf*. Privaterwerb (Vol. 1). Winter.
- Wahyudi, U., Zahroh, V. A., & Novitasari, D. (2024). *Fiscal Performance and Financial Independence of Malang City Government (2020 – 2024) : A Qualitative Assessment*. 8(2), 262–273.
- Weingast, B. R. (2009). Second generation fiscal federalism : The implications of fiscal incentives. *Journal of Urban Economics*, 65(3), 279–293. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2008.12.005>
- Wibowo, S. A. (2025). *Penggunaan EViews dalam Pengujian Data Panel untuk Penelitian Akuntansi : Pendekatan Konseptual dan Aplikatif*. 9(1). <https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.26898>
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Ekonisia FE UII.
- Yanti, F. A., & Hamzah, S. (2024). *Statistik Parametrik (untuk Penelitian Pendidikan dilengkapi Praktik)*.
- Zakiah, K. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 2016-2020. *Jurnal Budget : Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 7(2), 364–378. <https://doi.org/10.22212/jbudget.v7i2.137>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Kabupaten/Kota	Tahun	PAD	DP	BM
Kabupaten Bangkalan	2020	233180000000,00	1314106777000,00	177100000000,00
Kabupaten Bangkalan	2021	271660000000,00	1342915742000,00	226720000000,00
Kabupaten Bangkalan	2022	281900000000,00	1471347071000,00	220720000000,00
Kabupaten Bangkalan	2023	353690000000,00	1399605628000,00	228380000000,00
Kabupaten Bangkalan	2024	414120000000,00	1515315662000,00	294680000000,00
Kabupaten Banyuwangi	2020	482740000000,00	2025943441406,00	553400000000,00
Kabupaten Banyuwangi	2021	520020000000,00	2229563757776,00	744585100000,00
Kabupaten Banyuwangi	2022	516760000000,00	2301085797774,00	679240000000,00
Kabupaten Banyuwangi	2023	507670000000,00	2453370309486,00	829060000000,00
Kabupaten Banyuwangi	2024	597540000000,00	2429434258768,00	527990000000,00
Kabupaten Blitar	2020	302540000000,00	1469898940288,00	272000000000,00
Kabupaten Blitar	2021	407530000000,00	1519757917552,00	359930000000,00
Kabupaten Blitar	2022	156270000000,00	1572134683551,00	385120000000,00
Kabupaten Blitar	2023	378350000000,00	1597726418614,00	404730000000,00
Kabupaten Blitar	2024	452660000000,00	1694746525864,00	411270000000,00
Kabupaten Bojonegoro	2020	720910000000,00	2754943427535,00	1392810000000,00
Kabupaten Bojonegoro	2021	955640000000,00	4190666246429,00	1619930000000,00
Kabupaten Bojonegoro	2022	804010000000,00	4326959404057,00	1261890000000,00
Kabupaten Bojonegoro	2023	799660000000,00	4412764834036,00	2025420000000,00
Kabupaten Bojonegoro	2024	102240000000,00	4052467838016,00	1942970000000,00
Kabupaten Bondowoso	2020	222660000000,00	1264055581213,00	227250000000,00
Kabupaten Bondowoso	2021	223140000000,00	1323758092095,00	196550000000,00
Kabupaten Bondowoso	2022	189500000000,00	1297910080036,00	190400000000,00
Kabupaten Bondowoso	2023	200990000000,00	1364855214487,00	168470000000,00

Kabupaten Bondowoso	2024	294830000000,00	1346550326610,00	158940000000,00
Kabupaten Gresik	2020	924660000000,00	1331644546291,00	281700000000,00
Kabupaten Gresik	2021	1031390000000,00	1388743965408,00	298580000000,00
Kabupaten Gresik	2022	1191800000000,00	1528999930386,00	310160000000,00
Kabupaten Gresik	2023	1084490000000,00	1572411245945,00	425210000000,00
Kabupaten Gresik	2024	1385030000000,00	1681717116125,00	424460000000,00
Kabupaten Jember	2020	593180000000,00	2208327873867,00	188310000000,00
Kabupaten Jember	2021	635310000000,00	2205490834217,00	552080000000,00
Kabupaten Jember	2022	640240000000,00	2435573308430,00	829310000000,00
Kabupaten Jember	2023	686780000000,00	2522861210219,00	224940000000,00
Kabupaten Jember	2024	774170000000,00	2718533172486,00	270770000000,00
Kabupaten Jombang	2020	468630000000,00	1465246900235,00	243640000000,00
Kabupaten Jombang	2021	665840000000,00	1510656256873,00	372350000000,00
Kabupaten Jombang	2022	522526189811,00	1603822070444,00	358480000000,00
Kabupaten Jombang	2023	628096587719,00	1738080630385,00	240050000000,00
Kabupaten Jombang	2024	634640000000,00	2108829350721,00	263070000000,00
Kabupaten Kediri	2020	494410000000,00	1660449065562,00	400750000000,00
Kabupaten Kediri	2021	513770000000,00	1781942316819,00	319310000000,00
Kabupaten Kediri	2022	553806585199,00	1777572967855,00	370830000000,00
Kabupaten Kediri	2023	569150000000,00	1842993223834,00	478630000000,00
Kabupaten Kediri	2024	697850000000,00	1914625131838,00	330860000000,00
Kabupaten Lamongan	2020	481750000000,00	1542723757256,00	325360000000,00
Kabupaten Lamongan	2021	604590000000,00	1637147692887,00	327390000000,00
Kabupaten Lamongan	2022	507580000000,00	1742176617653,00	492500000000,00
Kabupaten Lamongan	2023	475080000000,00	1910562329933,00	324180000000,00
Kabupaten Lamongan	2024	559460000000,00	2038812875194,00	378760000000,00
Kabupaten Lumajang	2020	300260000000,00	1271212220474,00	198150000000,00
Kabupaten Lumajang	2021	325050000000,00	1290927288514,00	325050000000,00
Kabupaten Lumajang	2022	361390000000,00	1425426944694,00	301050000000,00
Kabupaten Lumajang	2023	312870000000,00	1398226445003,00	141660000000,00
Kabupaten Lumajang	2024	393570000000,00	1476064293757,00	184380000000,00
Kabupaten Madiun	2020	258210000000,00	1174980529263,00	254430000000,00
Kabupaten Madiun	2021	333150000000,00	1256826955632,00	183410000000,00
Kabupaten Madiun	2022	377430000000,00	1275033321703,00	318860000000,00
Kabupaten Madiun	2023	292340000000,00	1391106895647,00	288100000000,00
Kabupaten Madiun	2024	343010000000,00	1449517793197,00	272490000000,00
Kabupaten Magetan	2020	203470000000,00	1429338830723,00	237210000000,00
Kabupaten Magetan	2021	243730000000,00	1434437329412,00	157750000000,00
Kabupaten Magetan	2022	238170000000,00	1440424558484,00	217760000000,00
Kabupaten Magetan	2023	207860000000,00	1463629089821,00	220330000000,00

Kabupaten Magetan	2024	283750000000,00	1339615965972,00	199140000000,00
Kabupaten Malang	2020	583850000000,00	2205934268183,00	563770000000,00
Kabupaten Malang	2021	669360000000,00	2293906074127,00	439410000000,00
Kabupaten Malang	2022	736117874061,00	2189795776691,00	757710000000,00
Kabupaten Malang	2023	838906956543,00	2326982353441,00	538520000000,00
Kabupaten Malang	2024	928861257901,00	2818206531141,00	604400000000,00
Kabupaten Mojokerto	2020	537300000000,00	1284216322355,00	302410000000,00
Kabupaten Mojokerto	2021	625420000000,00	1346222555562,00	299820000000,00
Kabupaten Mojokerto	2022	676708151150,00	1290261342613,00	341130000000,00
Kabupaten Mojokerto	2023	656126287019,00	1399947097386,00	366200000000,00
Kabupaten Mojokerto	2024	719744298887,00	1457152651197,00	459810000000,00
Kabupaten Nganjuk	2020	402350000000,00	1441047387801,00	249630000000,00
Kabupaten Nganjuk	2021	478460000000,00	1486994028900,00	351680000000,00
Kabupaten Nganjuk	2022	445689935500,00	1435400517294,00	445250000000,00
Kabupaten Nganjuk	2023	402487512950,00	1725440312215,00	365890000000,00
Kabupaten Nganjuk	2024	486211985270,00	1825918947555,00	392970000000,00
Kabupaten Ngawi	2020	269980000000,00	1394716660633,00	281010000000,00
Kabupaten Ngawi	2021	283610000000,00	1471331470197,00	257950000000,00
Kabupaten Ngawi	2022	309326829397,00	1504824631341,00	293440000000,00
Kabupaten Ngawi	2023	307633055130,00	1663606113272,00	319890000000,00
Kabupaten Ngawi	2024	329632703731,00	1724561087564,00	323150000000,00
Kabupaten Pacitan	2020	168460000000,00	1106069120350,00	140060000000,00
Kabupaten Pacitan	2021	211690000000,00	1130204605402,00	174930000000,00
Kabupaten Pacitan	2022	165244644988,00	1202405310439,00	236410000000,00
Kabupaten Pacitan	2023	213298759558,00	1171570782821,00	243270000000,00
Kabupaten Pacitan	2024	223727536379,00	1196289614602,00	208130000000,00
Kabupaten Pamekasan	2020	232260000000,00	1178649523958,00	462850000000,00
Kabupaten Pamekasan	2021	205970000000,00	1239252236584,00	319200000000,00
Kabupaten Pamekasan	2022	231934835122,00	1331321498441,00	258590000000,00
Kabupaten Pamekasan	2023	306038747494,00	1353780562062,00	228180000000,00
Kabupaten Pamekasan	2024	306592620990,00	1364314063548,00	136810000000,00
Kabupaten Pasuruan	2020	700150000000,00	1755653880426,00	352130000000,00
Kabupaten Pasuruan	2021	701200000000,00	1757730596726,00	376070000000,00
Kabupaten Pasuruan	2022	736238743114,00	1945563655850,00	476870000000,00
Kabupaten Pasuruan	2023	825315022145,00	2092234913853,00	417560000000,00
Kabupaten Pasuruan	2024	905138895757,00	2218879847066,00	331150000000,00
Kabupaten Probolinggo	2020	254880000000,00	1474871521892,00	254600000000,00
Kabupaten Probolinggo	2021	300400000000,00	1375815571772,00	175520000000,00
Kabupaten Probolinggo	2022	261450104582,00	1500332255665,00	230170000000,00

Kabupaten Probolinggo	2023	299315561766,00	1445149023246,00	417560000000,00
Kabupaten Probolinggo	2024	348707288652,00	1562539188585,00	217860000000,00
Kabupaten Sampang	2020	175520000000,00	1562539188585,00	295430000000,00
Kabupaten Sampang	2021	135500000000,00	1173612142880,00	320620000000,00
Kabupaten Sampang	2022	184053093325,00	1271607036160,00	525270000000,00
Kabupaten Sampang	2023	333379000000,00	1301028110175,00	260930000000,00
Kabupaten Sampang	2024	362325850189,00	1312809014584,00	178000000000,00
Kabupaten Sidoarjo	2020	179852000000,00	1711271242511,00	519250000000,00
Kabupaten Sidoarjo	2021	192124000000,00	1716490317781,00	919010000000,00
Kabupaten Sidoarjo	2022	1801982663587,00	1920300000000,00	845930000000,00
Kabupaten Sidoarjo	2023	2050788676962,00	2022736000000,00	699900000000,00
Kabupaten Sidoarjo	2024	2353387157089,00	2137653594959,00	668080000000,00
Kabupaten Situbondo	2020	218850000000,00	1124820000000,00	237670000000,00
Kabupaten Situbondo	2021	228770000000,00	1144000000000,00	217520000000,00
Kabupaten Situbondo	2022	253352994071,00	1205978730517,00	266000000000,00
Kabupaten Situbondo	2023	266045812072,00	1228504667721,00	288500000000,00
Kabupaten Situbondo	2024	271677463608,00	1264649004980,00	276450000000,00
Kabupaten Sumenep	2020	260330000000,00	1487090215701,00	373680000000,00
Kabupaten Sumenep	2021	252690000000,00	1564471304262,00	276610000000,00
Kabupaten Sumenep	2022	247070353452,00	1565000000000,00	197060000000,00
Kabupaten Sumenep	2023	298570634143,00	1730000000000,00	230250000000,00
Kabupaten Sumenep	2024	304075441817,00	1815275000000,00	353110000000,00
Kabupaten Trenggalek	2020	257980000000,00	1205353056184,00	231310000000,00
Kabupaten Trenggalek	2021	233490000000,00	1222481059391,00	238770000000,00
Kabupaten Trenggalek	2022	422489000000,00	1300645390706,00	552520000000,00
Kabupaten Trenggalek	2023	267177163229,00	1239200413990,00	189390000000,00
Kabupaten Trenggalek	2024	281233905461,00	1320785110876,00	162560000000,00
Kabupaten Tuban	2020	566080000000,00	1410000000000,00	309230000000,00
Kabupaten Tuban	2021	614730000000,00	1442000000000,00	384850000000,00
Kabupaten Tuban	2022	574697000000,00	1546290962595,00	520350000000,00
Kabupaten Tuban	2023	681339000000,00	2117331625189,00	1164820000000,00
Kabupaten Tuban	2024	730296000000,00	2154170970960,00	1059910000000,00
Kabupaten Tulungagung	2020	510550000000,00	1557961745035,00	246380000000,00
Kabupaten Tulungagung	2021	953890000000,00	1552801795880,00	288290000000,00
Kabupaten Tulungagung	2022	577545000000,00	1608662520475,00	352050000000,00
Kabupaten Tulungagung	2023	719585860000,00	1616440590491,00	236840000000,00

Kabupaten Tulungagung	2024	709807139657,00	1777839335348,00	236260000000,00
Kota Batu	2020	136770000000,00	591924000000,00	94060000000,00
Kota Batu	2021	147010000000,00	619652000000,00	131190000000,00
Kota Batu	2022	203318424547,00	660265461901,00	112310000000,00
Kota Batu	2023	222284000000,00	636583000000,00	116520000000,00
Kota Batu	2024	257763000000,00	670000000000,00	104970000000,00
Kota Blitar	2020	174590000000,00	561000000000,00	114810000000,00
Kota Blitar	2021	297620000000,00	583000000000,00	130860000000,00
Kota Blitar	2022	157000000000,00	595885000000,00	160880000000,00
Kota Blitar	2023	172000000000,00	586700319000,00	132880000000,00
Kota Blitar	2024	169567000000,00	621315474706,00	132320000000,00
Kota Kediri	2020	262890000000,00	854447000000,00	98310000000,00
Kota Kediri	2021	439900000000,00	865751000000,00	106610000000,00
Kota Kediri	2022	319296000000,00	986071000000,00	169130000000,00
Kota Kediri	2023	351170000000,00	974724000000,00	197700000000,00
Kota Kediri	2024	390000000000,00	971768094258,00	152120000000,00
Kota Madiun	2020	248940000000,00	632559647797,00	191080000000,00
Kota Madiun	2021	265920000000,00	656137241477,00	197960000000,00
Kota Madiun	2022	264212229517,00	668609902487,00	232430000000,00
Kota Madiun	2023	255554493407,00	666070630012,00	204940000000,00
Kota Madiun	2024	279229358932,00	725271874658,00	159170000000,00
Kota Malang	2020	491190000000,00	1098463668428,00	363230000000,00
Kota Malang	2021	603790000000,00	1141106006927,00	295090000000,00
Kota Malang	2022	718337293395,00	1164294384628,00	310830000000,00
Kota Malang	2023	792120013218,00	1233407465441,00	389380000000,00
Kota Malang	2024	885318495121,00	1288635522105,00	191930000000,00
Kota Mojokerto	2020	231880000000,00	543918164967,00	113440000000,00
Kota Mojokerto	2021	256380000000,00	547666119755,00	159810000000,00
Kota Mojokerto	2022	232591456675,00	564749435829,00	261760000000,00
Kota Mojokerto	2023	256729510362,00	609735022212,00	226900000000,00
Kota Mojokerto	2024	265217818079,00	599335996564,00	147870000000,00
Kota Probolinggo	2020	183680648895,00	600921302282,00	86010000000,00
Kota Probolinggo	2021	212850000000,00	620122825758,00	69350000000,00
Kota Probolinggo	2022	191597662537,00	652144647692,00	250670000000,00
Kota Probolinggo	2023	209779956402,00	634206402044,00	110700000000,00
Kota Probolinggo	2024	206341550000,00	656882353121,00	75420000000,00
Kota Surabaya	2020	428996000000,00	2045481662469,00	158366000000,00
Kota Surabaya	2021	472728000000,00	2154338429336,00	101634000000,00
Kota Surabaya	2022	531470000000,00	2475155880738,00	176603000000,00
Kota Surabaya	2023	524463000000,00	2564776881262,00	163089000000,00

Kota Surabaya	2024	6114390000000,00	2814643777326,00	1897240000000,00
---------------	------	------------------	------------------	------------------

IKF	PE	PAD*PE	DP*PE	BM*PE
0,15	-5,59	-1303476200000,00	-7345856883430,00	-989989000000,00
0,19	-2,07	-562336200000,00	-2779835585940,00	-469310400000,00
0,19	-1,12	-315728000000,00	-1647908719520,00	-247206400000,00
0,20	1,20	424428000000,00	1679526753600,00	274056000000,00
0,21	1,94	803392800000,00	2939712384280,00	571679200000,00
0,19	-3,58	-1728209200000,00	-7252877520233,48	-1981172000000,00
0,19	4,08	2121681600000,00	9096620131726,08	3037907208000,00
0,18	4,43	2289246800000,00	10193810084138,80	3009033200000,00
0,17	5,03	2553580100000,00	12340452656714,60	4170171800000,00
0,20	4,68	2796487200000,00	11369752331034,20	2470993200000,00
0,17	-2,29	-692816600000,00	-3366068573259,52	-622880000000,00
0,21	3,02	1230740600000,00	4589668911007,04	1086988600000,00
0,09	5,20	812604000000,00	8175100354465,20	2002624000000,00
0,19	4,45	1683657500000,00	7109882562832,30	1801048500000,00
0,21	4,44	2009810400000,00	7524674574836,16	1826038800000,00
0,30	-0,40	-288364000000,00	-1101977371014,00	-557124000000,00
0,32	-5,54	-5294245600000,00	-23216291005216,70	-8974412200000,00
0,16	-6,16	-4952701600000,00	-26654069928991,10	-7773242400000,00
0,15	2,47	1975160200000,00	10899529140068,90	5002787400000,00
0,02	1,67	170740800000,00	6767621289486,72	3244759900000,00
0,15	-1,36	-302817600000,00	-1719115590449,68	-309060000000,00
0,14	3,49	778758600000,00	4619915741411,55	685959500000,00
0,13	3,51	665145000000,00	4555664380926,36	668304000000,00
0,13	4,62	928573800000,00	6305631090929,94	778331400000,00
0,18	4,87	1435822100000,00	6557700090590,70	774037800000,00
0,41	-3,68	-3402748800000,00	-4900451930350,88	-1036656000000,00
0,43	3,79	3908968100000,00	5263339628896,32	1131618200000,00
0,44	7,38	8795484000000,00	11284019486248,70	2288980800000,00
0,41	4,62	5010343800000,00	7264539956265,90	1964470200000,00
0,45	4,79	6634293700000,00	8055424986238,75	2033163400000,00
0,21	-2,98	-1767676400000,00	-6580817064123,66	-561163800000,00
0,22	4,00	2541240000000,00	8821963336868,00	2208320000000,00
0,21	4,53	2900287200000,00	11033147087187,90	3756774300000,00
0,21	4,93	3385825400000,00	12437705766379,70	1108954200000,00
0,22	4,86	3762466200000,00	13212071218282,00	1315942200000,00
0,24	-1,98	-927887400000,00	-2901188862465,30	-482407200000,00
0,31	3,24	2157321600000,00	4894526272268,52	1206414000000,00

0,25	5,37	2805965639285,07	8612524518284,28	1925037600000,00
0,27	5,04	3165606802103,76	8759926377140,40	1209852000000,00
0,27	5,15	3268396000000,00	10860471156213,20	1354810500000,00
0,23	-2,41	-1191528100000,00	-4001682248004,42	-965807500000,00
0,22	3,06	1572136200000,00	5452743489466,14	977088600000,00
0,24	4,90	2713652267475,10	8710107542489,50	1817067000000,00
0,24	4,53	2578249500000,00	8348759303968,02	2168193900000,00
0,27	4,95	3454357500000,00	9477394402598,10	1637757000000,00
0,24	-2,65	-1276637500000,00	-4088217956728,40	-862204000000,00
0,27	3,43	2073743700000,00	5615416586602,41	1122947700000,00
0,23	5,56	2822144800000,00	9686501994150,68	2738300000000,00
0,20	4,28	2033342400000,00	8177206772113,24	1387490400000,00
0,22	4,81	2691002600000,00	9806689929683,14	1821835600000,00
0,19	-2,79	-837725400000,00	-3546682095122,46	-552838500000,00
0,20	3,14	1020657000000,00	4053511685933,96	1020657000000,00
0,20	4,43	1600957700000,00	6314641364994,42	1333651500000,00
0,18	5,00	1564350000000,00	6991132225015,00	708300000000,00
0,21	4,52	1778936400000,00	6671810607781,64	833397600000,00
0,18	-1,69	-436374900000,00	-1985717094454,47	-429986700000,00
0,21	3,34	1112721000000,00	4197802031810,88	612589400000,00
0,23	4,32	1630497600000,00	5508143949756,96	1377475200000,00
0,17	5,12	1496780800000,00	7122467305712,64	1475072000000,00
0,19	4,68	1605286800000,00	6783743272161,96	1275253200000,00
0,12	-1,64	-333690800000,00	-2344115682385,72	-389024400000,00
0,15	3,04	740939200000,00	4360689481412,48	479560000000,00
0,14	3,89	926481300000,00	5603251532502,76	847086400000,00
0,12	4,47	929134200000,00	6542422031499,87	984875100000,00
0,17	4,79	1359162500000,00	6416760477005,88	953880600000,00
0,24	-2,68	-1564718000000,00	-5911903838730,44	-1510903600000,00
0,26	3,12	2088403200000,00	7156986951276,24	1370959200000,00
0,25	5,13	3776284693932,93	11233652334424,80	3887052300000,00
0,26	5,00	4194534782715,00	11634911767205,00	2692600000000,00
0,25	4,96	4607151839188,96	13978304394459,40	2997824000000,00
0,29	-1,11	-596403000000,00	-1425480117814,05	-335675100000,00
0,32	4,12	2576730400000,00	5546436928915,44	1235258400000,00
0,34	5,82	3938441439693,00	7509321014007,66	1985376600000,00
0,32	5,15	3379050378147,85	7209727551537,90	1885930000000,00
0,33	5,29	3807447341112,23	7708337524832,13	2432394900000,00
0,22	-1,71	-688018500000,00	-2464191033139,71	-426867300000,00
0,24	3,61	1727240600000,00	5368048444329,00	1269564800000,00

0,24	4,84	2157139287820,00	6947338503702,96	2155010000000,00
0,19	5,40	2173432569930,00	9317377685961,00	1975806000000,00
0,21	4,93	2397025087381,10	9001780411446,15	1937342100000,00
0,16	-1,69	-456266200000,00	-2357071156469,77	-474906900000,00
0,16	2,55	723205500000,00	3751895249002,35	657772500000,00
0,17	3,19	986752585776,43	4800390573977,79	936073600000,00
0,16	4,49	1381272417533,70	7469591448591,28	1436306100000,00
0,16	4,64	1529495745311,84	8001963446296,96	1499416000000,00
0,13	-1,84	-309966400000,00	-2035167181444,00	-257710400000,00
0,16	2,49	527108100000,00	2814209467450,98	435575700000,00
0,12	5,54	915455333233,52	6661325419832,06	1309711400000,00
0,15	4,46	951312467628,68	5225205691381,66	1084984200000,00
0,16	4,34	970977507884,86	5191896927372,68	903284200000,00
0,16	-2,54	-589940400000,00	-2993769790853,32	-1175639000000,00
0,14	3,41	702357700000,00	4225850126751,44	1088472000000,00
0,15	4,66	1080816331668,52	6203958182735,06	1205029400000,00
0,18	4,96	1517952187570,24	6714751587827,52	1131772800000,00
0,18	4,88	1496171990431,20	6657852630114,24	667632800000,00
0,29	-2,03	-1421304500000,00	-3563977377264,78	-714823900000,00
0,29	4,34	3043208000000,00	7628550789790,84	1632143800000,00
0,27	5,32	3916790113366,48	10350398649122,00	2536948400000,00
0,28	5,21	4299891265375,45	10900543901174,10	2175487600000,00
0,29	5,34	4833441703342,38	11848818383332,40	1768341000000,00
0,15	-2,12	-540345600000,00	-3126727626411,04	-539752000000,00
0,18	3,35	1006340000000,00	4608982165436,20	587992000000,00
0,15	4,52	1181754472710,64	6781501795605,80	1040368400000,00
0,17	4,73	1415762607153,18	6835554879953,58	1975058800000,00
0,18	4,82	1680769131302,64	7531438888979,70	1050085200000,00
0,10	-0,29	-50900800000,00	-453136364689,65	-85674700000,00
0,10	0,22	29810000000,00	258194671433,60	70536400000,00
0,13	2,31	425162645580,75	2937412253529,60	1213373700000,00
0,20	2,56	853450240000,00	3330631962048,00	667980800000,00
0,22	1,71	619577203823,19	2244903414938,64	304380000000,00
0,51	-3,69	-6636538800000,00	-6314590884865,59	-1916032500000,00
0,53	4,21	8088420400000,00	7226424237858,01	3869032100000,00
0,48	7,53	13568929456810,10	14459859000000,00	6369852900000,00
0,50	6,16	12632858250085,90	12460053760000,00	4311384000000,00
0,52	5,54	13037764850273,10	11842600916072,90	3701163200000,00
0,16	-2,33	-509920500000,00	-2620830600000,00	-553771100000,00
0,17	3,26	745790200000,00	3729440000000,00	709115200000,00

0,17	4,39	1112219643971,69	5294246626969,63	1167740000000,00
0,18	4,90	1303624479152,80	6019672871832,90	1413650000000,00
0,18	4,81	1306768599954,48	6082961713953,80	1329724500000,00
0,15	-1,13	-294172900000,00	-1680411943742,13	-422258400000,00
0,14	2,61	659520900000,00	4083270104123,82	721952100000,00
0,14	3,11	768388799235,72	4867150000000,00	612856600000,00
0,15	5,35	1597352892665,05	9255500000000,00	1231837500000,00
0,14	3,77	1146364415650,09	6843586750000,00	1331224700000,00
0,18	-2,17	-559816600000,00	-2615616131919,28	-501942700000,00
0,16	3,65	852238500000,00	4462055866777,15	871510500000,00
0,25	4,52	1909650280000,00	5878917165991,12	2497390400000,00
0,18	4,92	1314511643086,68	6096866036830,80	931798800000,00
0,18	4,71	1324611694721,31	6220897872225,96	765657600000,00
0,29	-5,85	-3311568000000,00	-8248500000000,00	-1808995500000,00
0,30	3,00	1844190000000,00	4326000000000,00	1154550000000,00
0,27	8,88	5103309360000,00	13731063747843,60	4620708000000,00
0,24	4,36	2970638040000,00	9231565885824,04	5078615200000,00
0,25	3,86	2818942560000,00	8315099947905,60	4091252600000,00
0,25	-3,09	-1577599500000,00	-4814101792158,15	-761314200000,00
0,38	3,53	3367231700000,00	5481390339456,40	1017663700000,00
0,26	5,22	3014784900000,00	8397218356879,50	1837701000000,00
0,31	4,91	3533166572600,00	7936723299310,81	1162884400000,00
0,29	4,86	3449662698733,02	8640299169791,28	1148223600000,00
0,19	-6,46	-883534200000,00	-3823829040000,00	-607627600000,00
0,19	4,29	630672900000,00	2658307080000,00	562805100000,00
0,24	6,51	1323602943800,97	4298328156975,51	731138100000,00
0,26	5,70	1267018800000,00	3628523100000,00	664164000000,00
0,28	5,76	1484714880000,00	3859200000000,00	604627200000,00
0,24	-2,28	-398065200000,00	-1279080000000,00	-261766800000,00
0,34	4,28	1273813600000,00	2495240000000,00	560080800000,00
0,21	5,22	819540000000,00	3110519700000,00	839793600000,00
0,23	5,29	909880000000,00	3103644687510,00	702935200000,00
0,21	5,33	903792110000,00	3311611480182,98	705265600000,00
0,24	-6,25	-1643062500000,00	-5340293750000,00	-614437500000,00
0,34	4,04	1777196000000,00	3497634040000,00	430704400000,00
0,24	6,18	1973249280000,00	6093918780000,00	1045223400000,00
0,26	6,19	2173742300000,00	6033541560000,00	1223763000000,00
0,29	5,04	1965600000000,00	4897711195060,32	766684800000,00
0,28	-3,39	-843906600000,00	-2144377206031,83	-647761200000,00
0,29	3,64	967948800000,00	2388339558976,28	720574400000,00

0,28	6,22	1643400067595,74	4158753593469,14	1445714600000,00
0,28	5,65	1443882887749,55	3763299059567,80	1157911000000,00
0,28	5,45	1521800006179,40	3952731716886,10	867476500000,00
0,31	-2,26	-1110089400000,00	-2482527890647,28	-820899800000,00
0,35	2,50	1509475000000,00	2852765017317,50	737725000000,00
0,38	3,95	2837432308910,25	4598962819280,60	1227778500000,00
0,39	1,92	1520870425378,56	2368142333646,72	747609600000,00
0,41	3,43	3036642438265,03	4420019840820,15	658319900000,00
0,30	-3,69	-855637200000,00	-2007058028728,23	-418593600000,00
0,32	3,65	935787000000,00	1998981337105,75	583306500000,00
0,29	5,56	1293208499113,00	3140006863209,24	1455385600000,00
0,30	2,79	716275333909,98	1701160711971,48	633051000000,00
0,31	5,32	1410958792180,28	3188467501720,48	786668400000,00
0,23	-3,64	-668597561977,80	-2187353540306,48	-313076400000,00
0,26	4,73	1006780500000,00	2933180965835,34	328025500000,00
0,23	5,52	1057619097204,24	3599838455259,84	1383698400000,00
0,25	5,80	1216723747131,60	3678397131855,20	642060000000,00
0,24	5,73	1182337081500,00	3763935883383,33	432156600000,00
0,60	-4,85	-20806306000000,00	-9920586062974,65	-7680751000000,00
0,69	4,06	19192756800000,00	8746614023104,16	4126340400000,00
0,60	6,12	32525964000000,00	15147953990116,60	10808103600000,00
0,59	6,04	31677565200000,00	15491252362822,50	9850575600000,00
0,60	5,15	31489108500000,00	14495415453228,90	9770786000000,00

Lampiran 2. Hasil Statistik Deskriptif

Date: 04/18/26
Time: 19:52
Sample: 2020 2024

	IKF	PAD	DP	BM
Mean	0.244417	6.04E+11	1.52E+12	3.98E+11
Median	0.223717	3.58E+11	1.44E+12	2.88E+11
Maximum	0.686823	6.11E+12	4.41E+12	2.30E+12
Minimum	0.024608	1.02E+11	5.44E+11	6.94E+10
Std. Dev.	0.106070	8.50E+11	6.56E+11	3.82E+11
Skewness	1.621492	4.587198	1.573523	2.864378
Kurtosis	6.250200	25.57088	7.852364	11.53158
Jarque-Bera	158.1056	4452.107	250.8700	792.0485
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	43.99508	1.09E+14	2.74E+14	7.17E+13
Sum Sq. Dev.	2.013909	1.29E+26	7.71E+25	2.61E+25
Observations	180	180	180	180

Lampiran 3. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21.420731	(35,141)	0.0000
Cross-section Chi-square	331.789772	35	0.0000

Lampiran 4. Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	6.688895	3	0.0825

Lampiran 5. Hasil Uji LM

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	219.8075 (0.0000)	0.803562 (0.3700)	220.6111 (0.0000)
Honda	14.82591 (0.0000)	-0.896416 (0.8150)	9.849637 (0.0000)
King-Wu	14.82591 (0.0000)	-0.896416 (0.8150)	3.898888 (0.0000)
Standardized Honda	15.59936 (0.0000)	-0.651556 (0.7427)	6.444858 (0.0000)
Standardized King-Wu	15.59936 (0.0000)	-0.651556 (0.7427)	1.425614 (0.0770)
Gourieroux, et al.	--	--	219.8075 (0.0000)

Lampiran 6. Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.270772	0.017058	15.87364	0.0000
PAD	1.37E-13	1.22E-14	11.27659	0.0000
DP	-7.92E-14	1.13E-14	-6.997862	0.0000
BM	2.40E-14	2.16E-14	1.108775	0.2691

Lampiran 7. Hasil Uji R2

R-squared	0.566561
Adjusted R-squared	0.548921
S.E. of regression	0.023802
F-statistic	32.11810
Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 8. Hasil Uji MRA

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
	t			
C	0.270772	0.017058	15.87364	0.0000
PAD	1.37E-13	1.22E-14	11.27659	0.0000
DP	-7.92E-14	1.13E-14	-6.997862	0.0000
BM	2.40E-14	2.16E-14	1.108775	0.2691
PE	0.004052	0.001299	3.118451	0.0021
PAD_PE	-2.91E-16	1.30E-15	-0.223207	0.8236
DP_PE	3.64E-16	1.21E-15	0.301473	0.7634
BM_PE	-9.38E-15	4.11E-15	-2.283273	0.0236

Lampiran 9. Biodata

BIODATA PENULIS

Nama : Muqniatul Husniyah
 TTL : Pasuruan, 04 Juni 2003
 Alamat Asal : RT. 001 RW. 012 Dusun Telebuk, Desa Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
 Telepon/HP : 085733146965
 E-mail : hsnhniaa0@gmail.com
 Instagram : @husniyah_cth

Pendidikan Formal

2010-2016 : Mi Miftahul Huda Lemahbang
 2016-2019 : SMP “Terpadu” Al Hidayah Ashomadiyah
 2019-2022 : Ma Maarif Sukorejo
 2022-2026 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non-Formal

2022-2023 : MSAA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2022-2023 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2023-2024 : Program Khusus Pendidikan Bahasa Inggris (PKPBI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- 1.Koperasi Mahasiswa Padang Bulan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2.Asisten Laboratorium Mini Bank Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 3.HIPMI PT UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Sertifikasi dan Pelatihan

1. Pelatihan Accurate
2. Pelatihan Atlas
3. Certified Accurate Professional (CAP)
4. Brevet Pajak A dan B

Lampiran 10. Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM	: 220502110060
Nama	: Muqriatul Husniyah
Fakultas	: Ekonomi
Program Studi	: Akuntansi
Dosen Pembimbing	: Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A
Judul Skripsi	: PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	9 September 2025	Membahas tentang pengajuan outline, pemilihan judul, serta jurnal acuan yang dipakai	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
2	29 September 2025	membahas pengantian variabel y, dikarenakan masih belum menemukan jurnal acuan yang sesuai	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
3	5 Oktober 2025	Perubahan judul, khususnya terkait var y dan moderasi yang masih kurang tepat	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
4	16 Oktober 2025	membahas tentang gap research dan novelty penelitian, rekomendasi perubahan metode dari regresi linier berganda menjadi metode MRA	Ganjil 2025/2026	Sudah Dikoreksi
5	17 Februari 2026	Pengumpulan draft awal Bab IV (Analisis Data)	Gesap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
6	20 Maret 2026	Memperkuat argumentasi pada hipotesis yang diterima maupun ditolak	Gesap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
7	17 April 2026	Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian	Gesap 2025/2026	Sudah Dikoreksi
8	29 Mei 2026	Memperbaiki sitasi, abstrak, kesimpulan, dan format penulisan	Gesap 2025/2026	Sudah Dikoreksi

Malang, 29 Mei 2026
Dosen Pembimbing

https://assanefw.uin-malang.ac.id/print/bimbingan/2325

6/2

03/05/26, 11:54 AM
Print Jurnal Bimbingan Skripsi



Lutfi Ardhani, S.E., M.S.A

Lampiran 11. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rohmatulloh Salis, M.Pd
NIP : 198409302023211006
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Muqniatul Husniyah
NIM : 220502110060
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
22%	14%	9%	20%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2026

UP2M



Rohmatulloh Salis, M.Pd